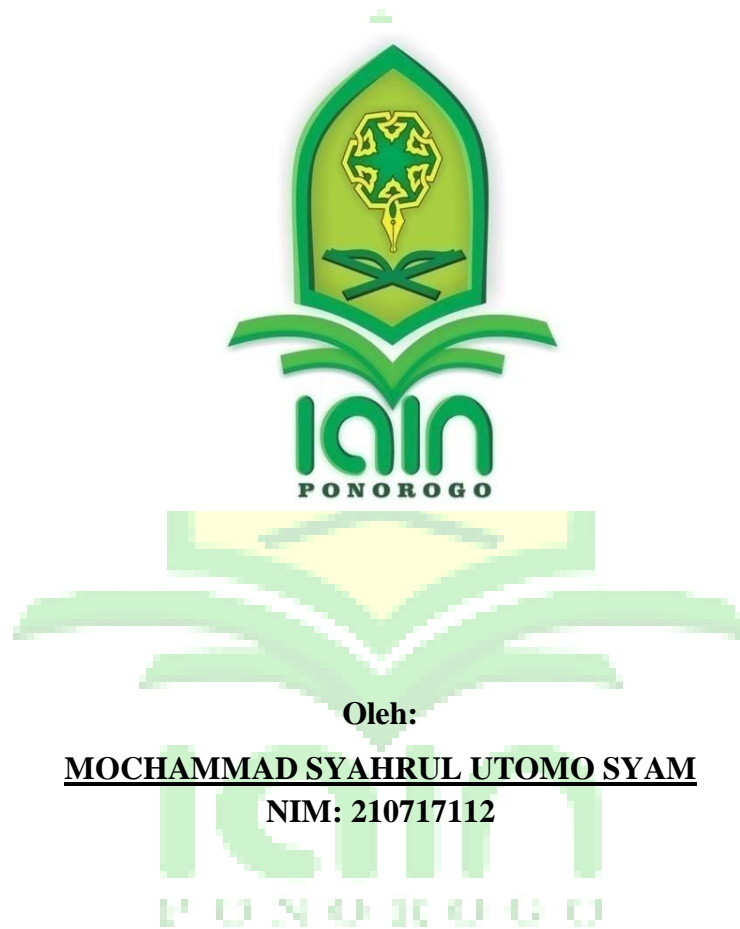


**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM
PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA UNIT
PENGELOLA KEUANGAN BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT NGUDI MULYO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MOCHAMMAD SYAHRUL UTOMO SYAM

NIM: 210717112

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Syahrul Utomo Syam

NIM : 2107171112

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Dana Bergulir Pada
Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo
Kabupaten Ponorogo**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 29 Agustus 2021

Demi buat Pernyataan,



Mochammad Syahrul Utomo Syam
NIM : 2107171112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang betandatangani di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Mochammad Syahrul Utomo Syam	210717112	Ekonomi Syariah	ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KREDIT DALAM PEMBERIAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA KEUANGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT NGUDI MULYO KABUPATEN PONOROGO

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Agustus 2021

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI
NIP. 197412111999032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Dana
Bergulir Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan
Masyarakat Kabupaten Ponorogo
Nama : Mochammad Syahrul Utomo Syam
NIM : 210717112
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang

Dr. Aji Damanuri, M. E. I.
NIP. 197506022002121003

Penguji I

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

Penguji II

Ridho Rokamah, M. Si.
NIP. 197412111999032002

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 15 September 2021
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Syahrul Utomo Syam
NIM : 210717112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 September 2021



Mochammad Syahrul Utomo Syam
NIM. 210717112

ABSTRAK

Syam, Mochammad Syahrul Utomo. 2021. “Analisa Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo” Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Ridho Rokamah, S.Ag.,MSI.

Kata Kunci : Manajemen Risiko Kredit, Pinjaman Dana Bergulir

UPK BKM Ngudi Mulyo merupakan lembaga keswadayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui program pinjaman dana bergulir untuk pemberdayaan masyarakat dalam perkembangan usaha produktif. Namun dengan seiring berjalannya program terjadi permasalahan kredit macet akan tetapi proses manajemen risiko sudah diterapkan sesuai dengan prosedurnya. Dengan hal ini peneliti melakukan pengkajian manajemen risiko serta penanganan kredit bermasalah pada pinjaman dana bergulir.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis manajemen risiko kredit terhadap pemberian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana analisis dampak pemberian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo?. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis domain yang analisis gambaran secara objek penelitian secara umum, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut.

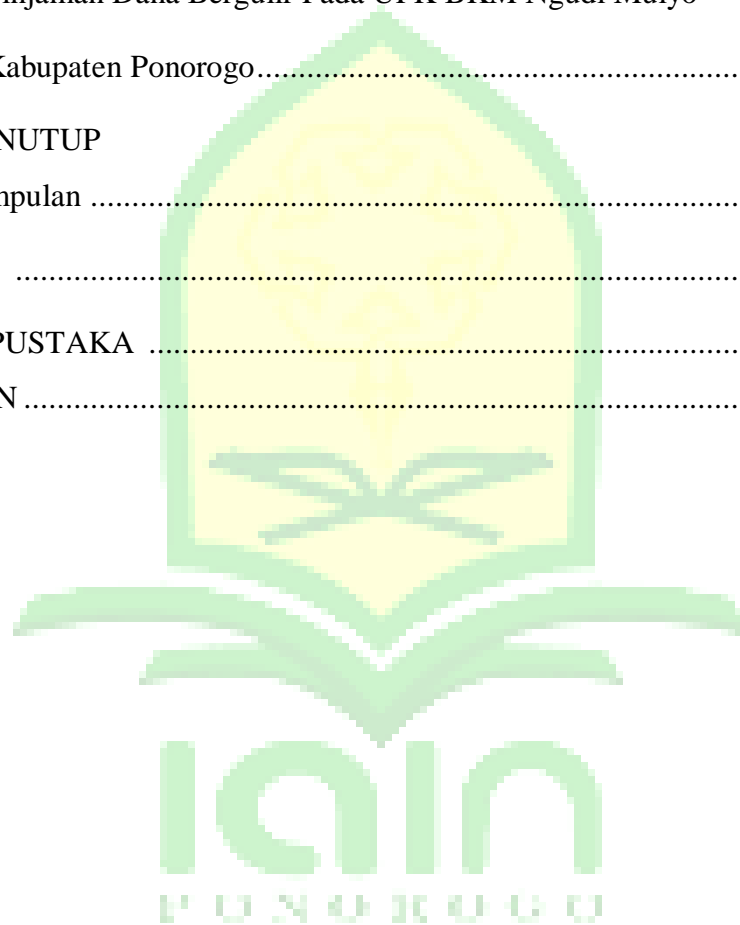
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko di UPK BKM Ngudi Mulyo dalam program pinjaman dana bergulir dalam melakukan analisa sudah menerapkan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko akan tetapi salah satu penerapan manajemen yang kurang baik dalam mengelola risiko kredit. Sedangkan penerapan manajemen risiko kredit pada program pinjaman dana bergulir adanya dampak yang terjadi kredit macet pada pinjaman dana bergulir dengan permasalahan nunggakan pembayaran dan permasalahan penunggakan karena adanya musibah yang dialaminya, selain itu dampak yang baik untuk masyarakat dalam membantu mengembangkan usahanya, risiko kredit penunggakan dalam pemenuhan kewajiban upaya yang dilakukan UPK BKM Ngudi Mulyo dengan metode *rescheduling* dan *reconditioning* serta strategi dalam mengatasi risiko-risiko dengan pendekatan secara langsung dan penagihan secara intensif.

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKAS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : MANAJEMEN RISIKO KREDIT	
A. Manajemen Risiko	12
1. Pengertian Manajemen Risiko	12
2. Tipe-tipe Risiko	14
3. Proses Manajemen Risiko	17
B. Risiko Kredit	20
1. Pengertian Kredit	20
2. Unsur-unsur Kredit	24
3. Jenis-jenis Kredit	25

4. Proses Pemberian Kredit	27
5. Penyelesaian Kredit Bermasalah	30
C. Kajian Pustaka	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Data dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengolahan Data	44
F. Teknik Analisis Data	46
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	47
BAB IV : DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
1. Sejarah Singkat BKM Ngudi Mulyo	49
2. Visi, Misi dan Tujuan BKM Ngudi Mulyo	50
3. Struktural Organisasi BKM Ngudi Mulyo	51
4. Tugas dan Fungsi	52
5. Produk dan Jasa	54
B. Paparan Data.....	57
1. Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo	57
2. Dampak Manajemen Risiko Kredit Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo	78

C. Analisis Data	84
1. Analisis Manajemen Risiko Kredit Terhadap Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.....	84
2. Analisis Dampak Manajemen Risiko Kredit Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.....	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-nama KSM dan Jumlah Pinjaman.....	55
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi	51
Gambar 4.2 Skema Tahapan Pinjaman Dana Bergulir	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian dan Draf Wawancara	100
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	102
Lampiran 3 Formulir Pengajuan Pinjaman	112
Lampiran 4 Dokumentasi	115
Lampiran 5 Riwayat Hidup	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencapaian kesejahteraan masyarakat membutuhkan intervensi keseluruhan pihak secara terkoordinasi. Namun kenyataannya selama ini kerjasama hanya dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, pemerintah bahkan swasta. Dimana perkembangan masyarakat dalam kegiatan usaha dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian penduduk dan dapat memperbaiki struktur ekonomi dan sosial, sehingga dapat membantu dalam mengembangkan dan memperluas usaha, stabilitas ekonomi, dan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dari bentuk kredit yang diperoleh dari lembaga keuangan.

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam bidang perekonomian negara yang memperoleh dana dari masyarakat. Berdasarkan kegiatan mengelola berbagai risiko perlu dilakukan pengelolaan manajemen melalui berbagai pencegahan risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul.¹ Manajemen risiko diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha.² Dalam proses manajemen risiko perlu aktivitas dalam mengidentifikasi memahami karakteristik risiko yang terjadi dan risiko yang timbul dengan

¹ Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Perbankan*, (Kendari: Unhalu Press, 2007), 15

² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Medisa, 2019), 238-239.

melakukan pengukuran dan pemantauan yang dievaluasi secara berkala dalam kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang terhimpun dengan menghasilkan kesempurnaan terhadap skala ukuran risiko yang terjadi dalam transaksi risiko dengan mengambil tindakan pengendalian yang disesuaikan mekanisme risiko tingkat yang akan diambil.

Manajemen risiko tidak hanya untuk dipelajari dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh badan usaha atau perusahaan, tetapi juga dipelajari dalam menghadapi dan meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan, tetapi perlu untuk mengelola siklus kehidupan perusahaan, maka dari itu pentingnya dalam mempelajari manajemen risiko. Seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan di Indonesia yang semakin pesat, maka manajemen risiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik. Dalam lembaga keuangan jika risiko tidak dapat dikelola dengan baik maka akan mengalami kegagalan bahkan bisa juga mengalami kebangkrutan.³ Dengan hal ini banyak lembaga yang memberikan pelayanan yang berupa pembiayaan, akan tetapi muncul perkembangan lembaga terjadi persoalan pembiayaan dalam hal teknis atau praktiknya, dengan itu implementasi manajemen risiko suatu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap lembaga keuangan.

Salah satu fungsi dasar dari lembaga keuangan adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Untuk layanan keuangan dengan biaya yang rendah, lembaga keuangan konvensional telah

³ Tariqullah Khan Ahmad Habib, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 194.

mengembangkan berbagai jenis kontrak, proses instrumen dan lembaga untuk memitigasi risiko, namun demikian dalam masa depan lembaga keuangan akan sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola risiko yang munsul dari operasionalnya ⁴

Risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵ Dalam dunia lembaga keuangan risiko merupakan suatu kejadian yang berpengaruh potensial yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan yang dapat berdampak dalam pendapatan permodalan lembaga. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi untuk dikelola dan dikendalikan oleh lembaga tersebut demikian dengan diatur dapat meminimalisir terjadinya risiko. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran yang dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.⁶

Dalam memperoleh angsuran kredit yang disediakan lembaga adanya beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum diberikan pencairan kredit dari tahapan pengajuan proposal usaha atau kredit yang dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung untuk menguatkan pengajuan proposal pinjaman, yang akan dilakukan teknis analisis survei kelayakan kriteria

⁴ Ibid., 4

⁵ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 55.

⁶ Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Perbankan: Pendekatan Praktis*, 22.

pinjaman dengan menguatkan suatu pengajuan perlu dilakukan wawancara secara bertahap.⁷ Melalui tahapan pengajuan perlu adanya pengawasan terhadap risiko yang alami oleh pihak kreditur sangat besar, hal ini akan berdampak pada likuiditas keuangan yang ada dalam pemberi dana yang memberikan dampak sangat signifikan dalam keberlangsungan lembaga.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat, BKM Ngudi Mulyo Ponorogo lembaga yang bergerak dalam program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di daerah Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo. BKM Ngudi Mulyo merupakan BKM di wilayah Kecamatan Ponorogo yang memiliki tiga unit dalam pengelolaan program. Salah satu unit dalam lembaga keswadayan masyarakat yang memiliki bentuk program pinjaman dana bergulir dikelola oleh unit pengelola keuangan dan disalurkan kepada kelompok masyarakat. Dalam penyaluran peminjaman dana tersebut unit pengelola keuangan selalu dihadapi dengan berbagai masalah risiko-risiko. Risiko tersebut bisa dapat berdampak negatif dalam pemutaran dana bergulir, dengan risiko yang terjadi dapat dihindari tetapi juga bisa dikelola dan dikendalikan secara maksimal.⁸

Berdirinya BKM Ngudi Mulyo dengan memiliki modal yang diberikan oleh Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum untuk dikelola dalam wujud keswadayaan masyarakat. Dengan demikian program yang disalurkan dalam bentuk sosial atau financial yang berdampak pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha baru, sehingga pendapatan masyarakat

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 103.

⁸ Buku Panduan Operasional BKM Ngudi Mulyo Keniten, 27

secara merata. Hasil wawancara Bapak Saifuddin sebagai koordinator BKM Ngudi Mulyo, mengatakan bahwa dalam pemberian pinjaman dana bergulir dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pendapatan masyarakat tersebar secara merata melalui hasil pinjaman dana tersebut. Lembaga dalam penyaluran dana bergulir menggunakan prinsip kepercayaan kepada pihak yang diberikan dana atau modal yang dibutuhkan dengan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta dapat dibayar atau diangsur oleh masyarakat sesuai dengan jangka waktu.⁹ Secara logikanya bila dana yang dihimpun akan disalurkan maka dana tersebut berkurang dan konsekuensinya akan dapat mengganggu likuiditas keuangan lembaga, karena penyaluran pinjaman tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan dana produktif sehingga dana yang disalurkan masyarakat tidak habis dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti di Unit Pengelola Keuangan dengan Bapak Suraji selaku koordinator UPK bahwa BKM Ngudi Mulyo, sejak berdirinya pada tahun 2006 dana yang diterima oleh UPK sebesar Rp. 90.000.000,- untuk disalurkan kepada KSM dalam mengembangkan ekonomi usahanya. Dalam pembagian hasilnya yang telah diatur oleh Aturan Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) dengan perincian terbagi dalam 50% untuk biaya operasional program, 40% pemupukan modal, 5% kegiatan lingkungan dan 5% kegiatan sosial.¹⁰ Terdapat 33 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdaftar dalam

⁹ Saifuddin, Wawancara, 05 Nopember 2020.

¹⁰ Buku pedoman AD/ART BKM, 33

catatan UPK kelompok yang bergabung dan aktif. Pinjaman dana bergulir yang diberikan tanpa jaminan serta menyertakan bunga angsuran yang rendah yaitu 1,5 % setiap angsuran pinjaman dana sebesar Rp.500.000 – 3.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan.¹¹

Dalam praktek yang terjadi pada UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa manajemen risiko yang dilakukan sudah menerapkan dalam tahapan proses pemberian pinjaman dana bergulir akan tetapi masih tetap muncul terjadinya permasalahan dalam kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Adapun pola penerapan manajemen risiko yang dilakukan di UPK BKM Ngudi Mulyo sudah sesuai dalam teori proses manajemen risiko antara lain identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko namun belum keseluruhan dilakukan secara maksimal.¹² Dalam proses pemberian pinjaman dana bergulir dilihat secara umum telah menerapkan proses kredit secara signifikan mulai dari proses pengajuan proposal sampai analisis kelayakannya, dimana pola yang dilakukan dalam bentuk proposal penambahan modal yang oleh masyarakat melalui bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beraggotakan 5-15 orang, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung proposal serta klarifikasi lainnya, akan tetapi dalam proses pemberian dana pihak UPK masih kurang teliti dalam pengidentifikasiannya.¹³

¹¹ Suraji, Wawancara, 05 Nopember 2020.

¹² Observasi, 05 Nopember 2020

¹³ Ibid.

Dengan jumlah pengajuan pinjaman dana bergulir yang semakin meningkat akan risiko, tanpa penerapan manajemen risiko secara maksimal akan terjadi penunggakan atau kredit macet dalam penyaluran dana bergulir sehingga UPK BKM Ngudi Mulyo harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat dari proses pinjaman dana bergulir yang dapat meminimalisir risiko yang timbul. Maka perlu diterapkan manajemen risiko yang baik dan maksimal dalam risiko yang timbul dari pinjaman dana bergulir dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Dari sini dapat kita cerna secara logika kemungkinan risiko yang akan terjadi memang cukup besar yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo sehingga dianggap perlu mengetahui alasan yang mendorong lembaga berani menjalankan program yang memiliki risiko terhadap keberlangsungan perusahaan untuk tetap bisa dijalankan sesuai dengan target dan pengembalian dana secara tepat waktu dan tetap jumlahnya. Karena demikian, maka penulis merasa perlu mengetahui manajemen risiko yang diterapkan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan programnya. Maka peneliti mengambil judul penelitian **“Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis manajemen risiko kredit dalam pemberian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis dampak manajemen risiko kredit dalam pemberian pinjaman dana bergulir pada Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan manajemen risiko kredit di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dampak manajemen risiko kredit dalam pemberian pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki nilai fungsi manfaat baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang asih dan wawasan terutama bagi FEBI IAIN

Ponorogo, sebagai masukan untuk pengembangan ilmu manajemen risiko kredit pada kegiatan khususnya pada lembaga non perbankan seperti kegiatan peminjaman dana bergulir.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi BKM Ngudi Mulyo terkhusus Unit Pengelola Keuangan, untuk dijadikan sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang akan terjadi dalam manajemen risiko kredit pada peminjaman dana bergulir.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dinas PUPR sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penanganan manajemen risiko kredit dan juga sebagai referensi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian kualitatif ini dengan menggunakan lima bab yang akan berisi tentang pembahasan yang akan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian dengan sistematis pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I adalah pendahuluan, pada Bab ini merupakan sebagai konsep secara umum dari penelitian ini yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan .

BAB II KAJIAN TEORI

Bab II adalah kajian teori, yaitu dasar kajian untuk menjawab yang ada pada penelitian. Dalam Bab ini yang akan dibahas tentang teori-teori yang akan menjadi pedoman penelitian. Dalam bab ini berisi manajemen risiko, risiko kredit, dan penyelesaian pemberian pinjaman yang bermasalah

BAB III METODE PENELITIAN

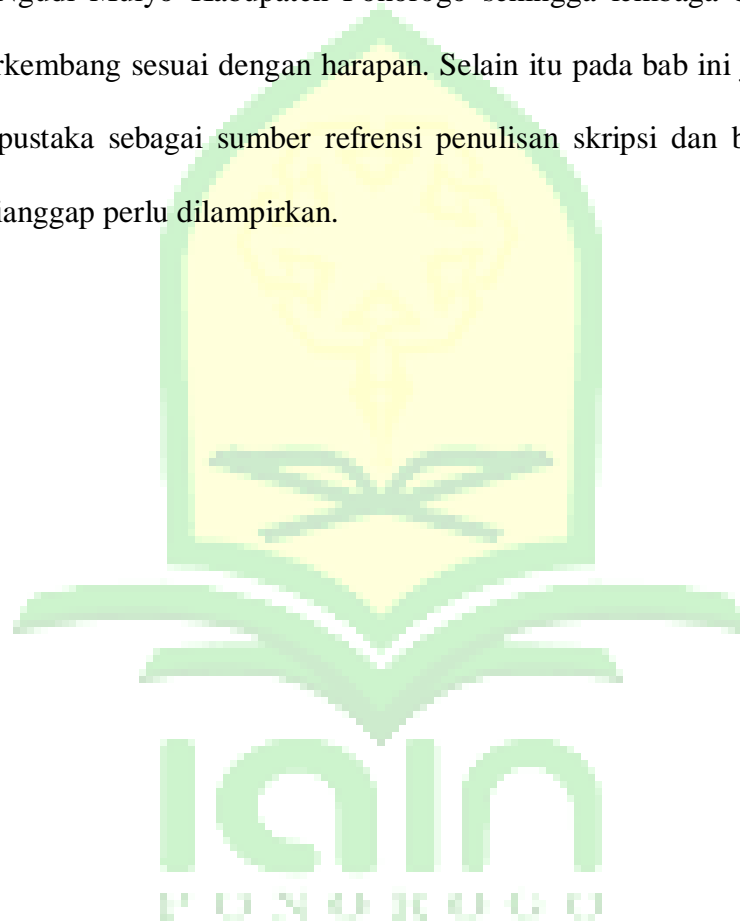
Bab III adalah menjelaskan metode penelitian yang berisi tentang jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Bab IV adalah paparan data secara deskriptif yang berkenan dengan mekanisme penerapan manajemen risiko kredit di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo dan menganalisis tentang data yang diperoleh mengenai manajemen risiko kredit pada pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menjabarkan secara deskriptif dan terperinci hasil-hasil paparan data, analisis data yang diperoleh akan dikelola dengan kaidahnya.

BAB V PENUTUP

Bab V yang terakhir yakni bab yang berisi penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak khususnya untuk penulis dan pembaca. Terutama untuk tujuan penerapan dan mekanisme manajemen risiko pemberian pinjaman di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo sehingga lembaga bisa bertahan dan berkembang sesuai dengan harapan. Selain itu pada bab ini juga terdapat daftar pustaka sebagai sumber referensi penulisan skripsi dan berkas-berkas yang dianggap perlu dilampirkan.



BAB II
MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PEMBERIAN
PINJAMAN DANA BERGULIR

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut buku yang berjudul “Manajemen Risiko” oleh Irham Fahmi mengemukakan definisi manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹

Menurut PBI Nomor 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko, kerugian itu bisa berbentuk financial atau non financial.²

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2018) , 2.

² Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 30

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.³

Dari beberapa definisi manajemen risiko diatas bahwa dapat disimpulkan risiko merupakan serangkaian dalam ketidakpastian yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan yang dapat timbul terjadinya kerugian.

Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang menyebabkan kerugian. Dalam kemungkinan yang dihadapi bahwa dapat memberikan keuntungan yang besar, jika terjadi kerugian walaupun hanya kecil. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *stackholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola lembaga keuangan mengenai kemungkinan kerugian dimasa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif lebih kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Tipe-tipe risiko bermacam-macam diantaranya risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko politik, risiko

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, 3.

perbankan.⁴ Akan tetapi tipe risiko yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah risiko kredit. Gambaran secara umum bahwa risiko kredit merupakan risiko yang terjadi akibat dari kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Tipe-tipe Risiko

Bagi pelaku usaha dan pihak lembaga perlu mengamati dalam penyaluran kredit yang diberikan kepada para debitur dan risiko yang akan ditanggung oleh para debitur. Maka dengan mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif perlu memahami tipe-tipe risiko yaitu:

a. Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan.⁵ Risiko pasar dikenal dalam perusahaan sebagai risiko yang menyeluruh, disebabkan oleh sifat umum keseluruhan yang akan mengalami perubahan dalam risiko tersebut. Perusahaan memiliki berbagai instrumen kebijakan yang digunakan untuk meminimalisir dan berusaha dalam penghindaran terjadinya risiko pasar. Kondisi pasar merupakan stabilitas yang mampu memberikan pengaruh signifikan dalam profit perusahaan, asalkan

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, 5

⁵ *Ibid.*, 69.

kondisi pasar yang masih berada dalam pengawasan manajemen sehingga akan terjadi optimal segi finansial maupun non finansial.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit sebagai risiko kerugian yang adanya hubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan atau tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁶ Risiko kredit terjadi ketika pihak lembaga perusahaan dengan nasabah dalam melakukan transaksi atas tindakan yang ketidak hati-hatian dalam memberikan keputusan kredit, dengan berbagai faktor yang disebabkan keinginan untuk memperoleh dana yang cepat dan maksimal dengan harapan mampu maksimal memberikan turnover yang maksimal.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 merupakan risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari.⁷ Manajemen perusahaan selalu berusaha dalam menjaga kondisi dan situasi likuiditas yang sehat dan terpenuhi secara tepat waktu, sehingga dapat memberikan reaksi kepada calon investor dan para

⁶ Ibid., 71

⁷ Amalia Indah Fitriana dan Hendra Galuh Febrianto, “Manajemen Risiko Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat”(studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Tangerang), Profita, Vol.11 No. 2 (2018), 253.

pemegang saham yang secara otomatis dapat memahami yang diharapkan dalam kenaikan.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul antara lain akibat ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.⁸ Kondisi terjadi risiko operasional sangat dipengaruhi oleh kualitas kematangan manajemen dalam suatu perusahaan. Seorang manajer dalam mengambil setiap keputusan harus selalu memikirkan dampak yang akan timbul dalam jangka pendek maupun panjang.

e. Risiko Politik

Risiko Politik adalah risiko yang timbul akibat dari instabilitas politik yang terjadi di suatu negara sehingga telah memberi pengaruh kepada organisasi yang berorientasi profit maupun non profit. Kondisi instabilitas politik yang tidak sesuai dengan pengharapan para pelaku bisnis telah menyebabkan timbul kerugian serta mengharuskan para pelaku bisnis menganggarkan sejumlah dana khusus dan beberapa rencana cadangan.⁹

⁸ Iwan Lesmana, "Risiko Operasional Bank dan Permodelannya", *Indonesia Journal of Accounting and Governance*, Vol. 1 No. 2 (2017), 31.

⁹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, 74

f. Risiko Perbankan

Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang penyaluran kredit dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya yang menimbulkan kerugian perbankan dalam bentuk finansial.¹⁰ Titik fokus dalam risiko perbankan pada masalah finansial karena bisnis perbankan yang bergerak dalam jasa keuangan mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabah untuk memperlancar segala urusan yang menyangkut dengan masalah keuangan.

3. Proses Manajemen Risiko

Dalam aktivitas lembaga keuangan wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material, dengan didukung oleh risiko yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur.¹¹

a. Mengidentifikasi Risiko

Proses dalam suatu aktivitas usaha secara akurat dan kompleks dalam manajemen risiko. Aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftarkan risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Dalam karakter manajemen risiko pada bank islam, tidak mencakup

¹⁰ Ibid.

¹¹ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 43.

berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya melainkan juga meliputi risiko yang khas pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah terletak pada proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, teknologi, manusia, kerusakan dan lingkungan eksternal.¹²

Dalam identifikasi risiko meliputi :

- 1) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala
- 2) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- 3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan (severity) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Teknik dalam proses pengukuran risiko antara lain: ¹³

¹² Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), 243.

¹³ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 45.

- 1) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis.
- 2) Sistem harus dapat mengukur sensitivitas produk terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya.
 - a) Kecenderungan perubahan faktor-faktor berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya.
 - b) Faktor risiko secara individual.
 - c) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko.¹⁴

c. Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan exposure risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹⁵

Dalam pengendalian risiko memiliki beberapa manajemen yang sesuai dengan exposure risiko maupun tingkat yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Pengendalian risiko dapat

¹⁴ Ibid., 41

¹⁵ Ibid., 47.

dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritas modal bank menyerap.¹⁶

d. Pemantauan Risiko

Dalam pemantauan risiko bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.¹⁷ Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun SKMR hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Pemantauan perlu menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

B. Risiko Kredit

1. Pengertian Risiko Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

¹⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, 244.

¹⁷ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 49.

bunga.¹⁸ Dalam kesederhanaan kredit merupakan kemampuan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana dengan sejumlah dana yang akan dibayar masa datang.¹⁹

Menurut buku Irham Fahmi dan Yovi Lavianati Hadi, manajemen kredit adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau institusi dengan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk merencanakan mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya.²⁰

Sedangkan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu baik pada jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.²¹ Menurut Bambang Rianto Rustam, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan

¹⁸ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

¹⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2014), 93.

²⁰ Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 3.

²¹ *Ibid.*, 18.

nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²²

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit adalah risiko yang terjadi dari permasalahan pembiayaan yang dilakukan nasabah dalam kewajiban akan dapat berhubungan dengan tingkat kegagalan dalam melunasi kewajibannya dan operasional perusahaan

a. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum merupakan pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa, dan konsumsi untuk menaikkan taraf hidup masyarakat. Fungsi-fungsi kredit sebagai berikut:²³

- 1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa.
- 2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle.
- 3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru.
- 4) Kredit dapat sebagai alat pengendalian harga.
- 5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat potensi yang tersedia

²² Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, 55.

²³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, 96.

b. Manfaat Kredit

Dalam fungsi kredit yang akan dilaksanakan dalam rangka memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain manfaat kredit sebagai berikut:²⁴

1) Bagi Debitur

- a) Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi
- b) Kredit bank relatif mudah
- c) Berbagai macam jenis kredit sesuai dengan calon debitur
- d) Rahasia keuangan debitur terlindungi

2) Bagi Bank:

- a) Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh
- b) Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan
- c) Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank

3) Bagi Pemerintah:

- a) Alat untuk memacu pertumbuhan secara umum
- b) Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter
- c) Alat untuk menciptakan lapangan usaha

²⁴ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, 4

4) Bagi Masyarakat:

- a) Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi
- b) Mengurangi tingkat pengangguran
- c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya dibank

2. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur yang paling utama karena adanya rasa saling percaya antara kreditur dan debitur maka akan sangat sulit terwujud suatu sinergi kerja yang baik. Kepercayaan akan diberikan dalam dana yang diberikan setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang lebih mendalam dalam kriteria nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kemampuan dalam melakukan pembayaran kredit disalurkan.²⁵

b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur dalam kredit setelah kepercayaan antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian masing-masing pihak yang menandatangani dan kewajiban masing pihak atas dasar akad kredit.²⁶

²⁵ Ibid., 7.

²⁶ Ibid., 9

c. Waktu

Waktu adalah unsur dimana kreditur saat menyerahkan uang kepada debitur, untuk dilakukan perhitungan pembayaran transaksi kembali yang akan dilakukan oleh pihak kreditur.²⁷

d. Balas Jasa

Balas jasa merupakan fasilitas yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam dasarnya penyaluran ini tidak bentuk uang tapi juga bisa bentuk barang atau jasa (good and service).²⁸ Balas jasa dikenal dalam bentuk bunga, biaya komisi serta biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan dari bank

3. Jenis-jenis Kredit

Dalam kategorisasi kredit yang dapat menyebabkan beberapa posisi yang berbeda dengan kegunaan masing-masing, sehingga masyarakat dapat memilih kredit yang sesuai dengan kebutuhannya. Jenis-jenis kredit dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:²⁹

a. Kredit Berdasarkan Jenisnya

1) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.³⁰

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Rachmat Firdaus, "Manajemen Perkreditan Bank Umum," 8.

³⁰ Ibid.,10

2) Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang diajukan oleh kreditur untuk digunakan dalam bergerak dunia usaha yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam berekspansi bisnis untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh menjadi tinggi.³¹

3) Kredit Likuiditas

Kredit likuiditas merupakan kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif, tapi secara langsung tidak pula untuk produktif melainkan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam pemeliharaan.³²

b. Kredit Berdasarkan Waktunya.

1) Risiko Jangka Pendek

Risiko jangka pendek adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat likuiditas.³³

2) Risiko Jangka Panjang

Risiko jangka panjang adalah risiko yang dimana adanya ketidakmampuan dalam perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban likuiditas dengan jangka panjang.³⁴

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*,, 19.

³⁴ Ibid.

4. Proses Pemberian Kredit

Dalam memperoleh kredit terlebih dahulu melalui beberapa tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga dapat dianalisis dokumen yang diajukan keasliannya untuk dapat dikucurkan kreditnya. Prosedur pemberian dan penilaian kredit dalam dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain, membedakan hanya pada pertimbangan penilaian masing-masing lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan. Secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

a. Pengajuan Proposal

Dalam tahap ini merupakan tahap permulaan yang saling mengetahui informasi terkait proses pengajuan proposal antara calon debitur dengan lembaga, terutama nasabah awal merupakan tahapan pertama untuk permohonan kredit dengan melakukan penggalian informasi melalui wawancara atau cara lain. Informasi global / umum yang dikemukakan oleh lembaga antara lain tentang prosedur/tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit, persyaratan yang dipenuhi, sistem akad peminjaman dana yang akan digunakan. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak lembaga tentang keadaan usaha calon debitur, surat-surat essensial perusahaan (antara lain

akta pendirian perusahaan, bukti diri (KTP), NPWP, kartu keluarga dan surat-surat lain yang diperlukan) jaminan/agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya.³⁵

b. Analisis Berkas Pengajuan

Dalam analisis berkas ini digunakan untuk penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan dalam pengajuan kredit, tahap ini dilakukan guna untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.³⁶ Jika dalam proses analisis persyaratan pengajuan belum lengkap yang sesuai standar yang ditentukan, maka nasabah diberikan penambahan waktu untuk melengkapi kekurangan dan apabila dari batas waktu yang telah disepakati tidak sanggup maka pengajuan dianggap gugur atau batal. Kemudian keaslian dokumen-dokumen yang diberikan untuk analisis pihak lembaga dalam mengkalkulasikan, apakah jumlah dana yang diajukan pinjaman relevan dan tingkat kemampuan nasabah dalam pembayaran kredit yang dipinjamnya.

c. Analisis Kelayakan Kredit

Dalam menganalisis atau menilai permohonan kredit dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan kredit memenuhi prinsip-prinsip 6A atau tidak.

³⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), 107-108.

³⁶ Ibid. 110

Analisis atau penilaian permohonan tersebut dikerjakan dalam pelaksana yang khusus bertugas untuk pekerjaan tersebut yang dikenal sebagai analis kredit. Aspek-aspek yang dinilai oleh analis kredit pada tahap ini antara lain sebagai berikut: aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial.³⁷

d. Peninjauan Lokasi

Setelah dilakukan beberapa analisis dokumen, selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi yang menjadi objek kredit, kemudian dari hasil peninjauan lokasi dicocokkan dengan rencana anggaran yang diajukan dalam proposal kredit yang diserahkan. Dalam peninjauan lokasi tidak diketahui oleh nasabah untuk dilakukan peninjauan, sehingga hasil yang kita lihat dengan kondisi yang sebenarnya, peninjauan ini untuk memastikan objek yang diberikan pinjaman kredit benar dan sesuai sasaran dan tujuan lembaga.³⁸

e. Wawancara

Tahap wawancara merupakan tahapan penyidikan dan pencocokan dari proposal kredit yang diajukan dan peninjauan lokasi. Proses ini sebagai penguat dan keyakinan nasabah yang sesuai dengan kondisi dan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

³⁷ Ibid.,111.

³⁸ Ibid., 112

f. Keputusan Kredit

Melalui proses penilaian, kelengkapan dan kelayakan usaha maka dari pihak lembaga memberikan persetujuan nasabah untuk mendapatkan kredit pinjaman yang sesuai dengan diajukan, kemudian dipersiapkan segala administrasi sebagai pengambilan dana yang mencakup akad kredit yang ditandatangani, jumlah dana yang diterima, jangka waktu dalam kredit, dan biaya administrasi lainnya yang harus dibayarkan.³⁹

g. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya merealisasikan kredit dengan penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan rekening tabungan dari pihak bank yang bersangkutan. Demikian pencairan dana dalam realisasi kredit sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dilakukan secara bertahap maupun secara langsung.⁴⁰

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

a. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

1) Internal Bank:

- a) Analisa kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.,113.

- b) Adanya kolusi antara pejabat bank dalam menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit tidak diberikan
- c) Keterbatasan pengetahuan terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

2) Eksternal Bank:

- a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban
- b) Debitur melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1) Dari Pihak Perbankan

Dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2) Dari Pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.⁴¹

Upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan.
 - a. Memperpanjang jangka waktu kredit

⁴¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120.

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari waktu 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Merubah jangka waktu angsuran

Merubah angsuran seperti jangka waktu angsuran pada waktu kredit. Dalam hal ini dilakukan perubahan untuk memberikan kesempatan nasabah untuk mengumpulkan dana angsuran yang semula sebulan sekali dalam angsuran diubah menjadi triwulan sekali.

2. *Reconditioning* adalah usaha yang dilakukan oleh bank atau lembaga dalam penyelamatan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank atau lembaga. Beberapa tindakan *reconditioning* yang diberikan antara lain:

a. Penurunan suku bunga

Dalam tindakan penurunan suku bunga bertujuan untuk lebih meringankan beban nasabah, seperti pada bunga kredit pada awalan perjanjian sebesar 20% dan diturunkan menjadi 18%. Dengan beberapa pertimbangan akan menurunkan suku bunga untuk memperkecil biaya

bunga yang dibayar oleh nasabah dan secara total angsuran menjadi lebih rendah.⁴²

b. Pembebasan bunga

Tindakan pembebasan bunga diberikan kepada nasabah yang terjadi masalah tunggakan dalam setiap periode, sehingga nasabah tetap memiliki kewajiban dalam membayar pokok pinjaman sampai selesai transaksi pinjaman.

c. Penundaan pembayaran bunga

Dalam penundaan pembayaran bunga yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah mampu membayarnya.

d. Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang terjadi tunggakan dijadikan satu dengan pokok pinjaman.

3. *Restructuring*, merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit yang dilakukan sebelum atau sesudah masa tempo kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan apabila bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek

⁴² Ismail, *Manajemen Perbankan*, 129.

usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kreditnya direstrukturisasikan.⁴³

4. Kombinasi, tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian kredit dengan cara mengkombinasikan ketiga cara antara lain: *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring*.
5. Eksekusi merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan penjualan agunan yang dimiliki bank, sehingga hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok maupun bunga.

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Yanty dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang.”⁴⁴ Dalam penelitian ini memiliki hal persamaan dengan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah membahas tentang manajemen risiko terhadap meminimalisir permasalahan dalam kredit macet. Metode penelitian yang sama dengan menggunakan pendekatan kualitatif

⁴³ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: teori, masalah, kebijakan dan aplikasi lengkap dengan analisis kredit*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 168.

⁴⁴ Irma Yanty, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang,” Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

dengan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan penalaran terhadap dokumen tertulis / dokumentasi.. Sedangkan hal perbedaan dalam rujukan penelitian terdahulu adalah lebih dilakukan secara langsung pada internal PT Pegadaian cabang Enrekang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang menggunakan analisis 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of Economic* dalam meminimalisir terjadi kredit macet. Dalam data kredit macet di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang terjadi fluktuasi sehingga penerapan manajemen risiko tidak efektif untuk digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.”⁴⁵ Dalam penelitian ini memiliki hal persamaan dengan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah membahas tentang manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang sama dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan hal perbedaan dalam penelitian ini objek penelitian yang berlokasi pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Hasil penelitian ini bahwa analisa nasabah menggunakan metode 5C dalam keseluruhan aktivitas yang dimulai dari

⁴⁵ Sarah Nadia, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh,” Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

sebelum pembiayaan diambil hingga pembiayaan selesai. Berdasarkan pola aktivitas penerapan manajemen risiko yang diterapkan sudah berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah pembiayaan yang bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopingi dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemberian Pinjaman Ekonomi Bergulir Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Ditinjau dari segi Ekonomi Islam.”⁴⁶ Dalam penelitian ini memiliki hal persamaan dengan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah membahas tentang peningkatan ekonomi masyarakat dalam pinjaman ekonomi bergulir. Metode penelitian yang sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan hal perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah cara meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program KOTAKU. Hasil penelitian ini bahwa dalam mengantisipasi terjadinya kredit macet menunjukkan adanya tabungan wajib untuk para peminjam, jadi dalam setiap bulan para peminjam wajib membayar angsuran dan tabungan sesuai besaran pinjaman, antisipasi yang diberikan ini untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

Penelitian yang dilakukan oleh Stefi Sulistiyoningrum dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri

⁴⁶ Sopingi, “Analisis Pemberian Pinjaman Ekonomi Bergulir Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Ditinjau dari segi Ekonomi Islam,” Skripsi, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

Perkotaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.”⁴⁷ Dalam penelitian ini memiliki hal persamaan dengan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan tentang pemberian pinjaman bergulir. Metode penelitian yang sama digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan pengimplementasian kredit bergulir kepada subjek penelitian Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hasil penelitian ini bahwa pemberian kredit bergulir menunjukkan perkembangan jumlah pengguna kredita yang cenderung meningkat dan rendahnya kredit macet, maka itu adanya keberhasilan dalam menarik minat masyarakat untuk membantu mengembangkan usahanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Niswati dalam skripsi yang berjudul Aplikasi Manajemen Risiko Kredit Pada BPR Nusumma Gondanglegi Malang.⁴⁸ Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan terfokus dalam penerapan manajemen risiko kredit, penelitian menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan beberapa cara dalam mengumpulkan data penelitian wawancara dan observasi. Sedangkan dalam perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu adalah objek pada BPR (Badan Perkreditan Rakyat) daerah

⁴⁷ Stefi Sulistiyoningrum, “Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPB Mandiri Perkotaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri,” Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010).

⁴⁸ Khoirun Niswati, “Aplikasi Manajemen Risiko Kredit Pada BPR Nusumma Gondanglegi Malang,” Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

Gondanglegi Malang. Hasil penelitian ini bahwa kredit yang ada dalam kredit yang bermasalah tidak segera diantisipasi akan menurunkan rentabilitas penggunaan likuiditas. Dalam penggunaan manajemen risiko kredit belum terlaksana secara maksimal, penerapan pejabat khusus manajemen risiko belum terlaksana dengan ini didapati adanya fungsi ganda jabatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yaniar Wineta Pratiwi, dkk, dalam jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Ponorogo).⁴⁹ Dalam jurnal penelitian ini yang dijadikan penelitian terdahulu terdapat kesamaan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam manajemen risiko dan kredit yang bermasalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian terdahulu ini adalah menggunakan variabel dalam penelitian kredit modal kerja dan objek penelitian yang dituju yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit dengan informasi manajemen risiko kredit serta pengendalian untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Ponorogo terlaksanakan dengan baik.

⁴⁹ Yaniar Wineta Pratiwi, "Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Ponorogo)", Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 38, No.1 (September 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggali data tentang pola penerapan manajemen risiko kredit secara langsung di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.¹ Dalam hal ini peneliti sebagai narasumber secara langsung di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak lembaga sehingga dapat menghasilkan data-data yang peneliti inginkan baik berupa data lisan maupun tertulis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dimana peneliti melakukan penggalan data-data yang diperoleh. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Unit Pengelola Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (UPK-BKM) Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 207.

Adapun peneliti memilih lokasi Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo sebagai objek penelitian karena lembaga tersebut merupakan salah satu dari 19 BKM yang ada di daerah Kecamatan Ponorogo. Program ini akan dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang sesuai dengan aturan dalam standar operasional dalam dana bergulir untuk penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada Kelompok Swadayaan Masyarakat (KSM) dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam fenomena yang terjadi terdapat adanya kejanggalan dalam risiko kredit dana pinjaman bergulir terjadinya beberapa Kelompok Swadayaan Masyarakat (KSM) mengalami kemacetan dalam angsuran kembali dana bergulir tetapi masih terus berjalan kegiatan operasional, sehingga peneliti perlu untuk mengetahui manajemen lembaga dan dapat menganalisa penerapannya dan akan dijadikan sebagai objek penelitian.

C. Data dan Sumber Data

Data yang perlu dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data terkait dengan manajemen risiko kredit pemberian pinjaman di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo, berupa hasil wawancara mendalam terkait dengan mekanisme pengelolaan manajemen risiko kredit secara keseluruhan yang disertai kegiatan observasi, dan dokumentasi penting operasional seperti transaksi pembiayaan pinjaman dana bergulir yang dimana responden memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dan didukung oleh dokumen resmi dan foto-foto kegiatan operasional Badan Keswadayaan Masyarakat Ngudi Mulyo.

Dalam data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara secara mendalam dan dokumen pendukung lainnya yang akan dilakukan analisa secara keseluruhan mulai dari penerapan pemberian pinjaman dana bergulir sampai pada pola penerapan manajemen risiko yang dilakukan di lembaga UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.

Dalam mendukung penelitian ini di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo, maka dari itu untuk mendapatkan kelengkapan data tersebut diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

1. Sumber data primer yang dilakukan dari kegiatan observasi dan wawancara kepada seluruh elemen dari lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo, yaitu koordinator, sekretaris dan koordinator Unit Pengelola Keuangan dan beberapa masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadayaan Masyarakat (KSM).
2. Sumber data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen laporan keuangan, rekapan transaksi pinjaman dana bergulir dan foto kegiatan kepada Kelompok Swadayaan Masyarakat (KSM) dan beserta beberapa buku panduan kegiatan operasional Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai rujukan dalam pengelolaan manajemen lembaga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan berbagai metode seperti, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Metode *Field Research*

Merupakan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media komunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman.²

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif yang dimaksud mendalami suatu kejadian atau kegiatan di objek penelitian. Wawancara diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak terjadi ketidakmungkinan dalam observasi secara langsung serta juga perlu memahami perspektif orang lain dalam dunia kehidupan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³ Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), ceritra, biografi peraturan, kebijakan dokumnetasi yang berbentuk gambar

² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 31.

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta. 2010), 41

yang dapat memberikan informasi pendukung dalam manajemen risiko kredit pada transaksi pemberian pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu proses kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk dapat memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁴ Metode ini menggunakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti guna untuk mengetahui perilaku konsumen dalam mengelola keuangan pribadinya. Dalam penggunaan observasi penelitian melakukan observasi nonpartisipan yang dimana peneliti melakukan secara langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang aktivitas, orang-orang sedang diamati, maka dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya yang dilakukan pengamat independen.⁵

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber baik dari buku, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya sehingga selanjutnya dapat melakukan pengolahan data menggunakan metode kualitatif sebagai berikut:

⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), 209.

⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2016), 145.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengolah data dari lapangan dengan memilah, memilih dan menyederhanakan data dengan merangkum yang penting-penting sesuai dengan fokus masalah penelitian.⁶ Dengan ini hasil dari reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya dan data tambahan lainnya. Oleh karena itu dapat memberikan data yang relevan terhadap masalah yang diteliti tentang pemberian dana bergulir pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo dalam masalah penerapan manajemen risiko kredit.

2. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang terjadi di lapangan dan dapat dijadikan dalam tindakan pengambilan analisis data dengan penyajian tabel dan gambar. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matrik sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain.⁷

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab dari rancangan rumusan masalah yang masih bersifat sementara ataupun tidak, karena dalam kesimpulan dapat diketahui setelah melakukan penelitian di lapangan dengan harapan dapat menghasilkan teori baru

⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, 218.

⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 34.

atau temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan ini berharap dapat memberikan solusi dengan adanya manajemen risiko kredit pada pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah satuan unit yang dapat dikelola mensintensiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dengan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain dalam mendekati suatu permasalahan penelitian kualitatif. Teknik analisa domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum, namun relatif utuh tentang objek penelitian.⁹

Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian, yaitu:

1. Melakukan tinjauan terhadap pengelolaan manajemen risiko kredit dalam pemberian dana pinjaman bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo.
2. Melakukan tinjauan prosedur pinjaman dana bergulir.
3. Melakukan tinjauan terhadap permasalahan risiko kredit dalam pelaksanaan pemberian dana pinjaman bergulir.

⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 247.

⁹ *Ibid.*, 256

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif dengan mengungkapkan kebenaran secara objektif adalah suatu keharusan, oleh karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting. Dalam menentukan keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas. Data yang akan diujikan menggunakan beberapa teknik pengujian yaitu:¹⁰

1. Perpanjangan Pengamatan

Pada teknik perpanjangan pengamatan peneliti melakukan kembali ke lapangan untuk pengamatan dan wawancara kembali untuk memastikan data yang diperoleh telah valid dan benar. Perpanjangan pengamatan juga akan menumbuhkan hubungan erat akrab dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

Dalam hal ini setelah peneliti memperpanjang pengamatan, apakah akan menambah fokus penelitian, sehingga memerlukan tambahan informasi baru lagi dengan hasil yang berubah atau tetap. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat berakhir.

2. Meningkatkan Ketekunan

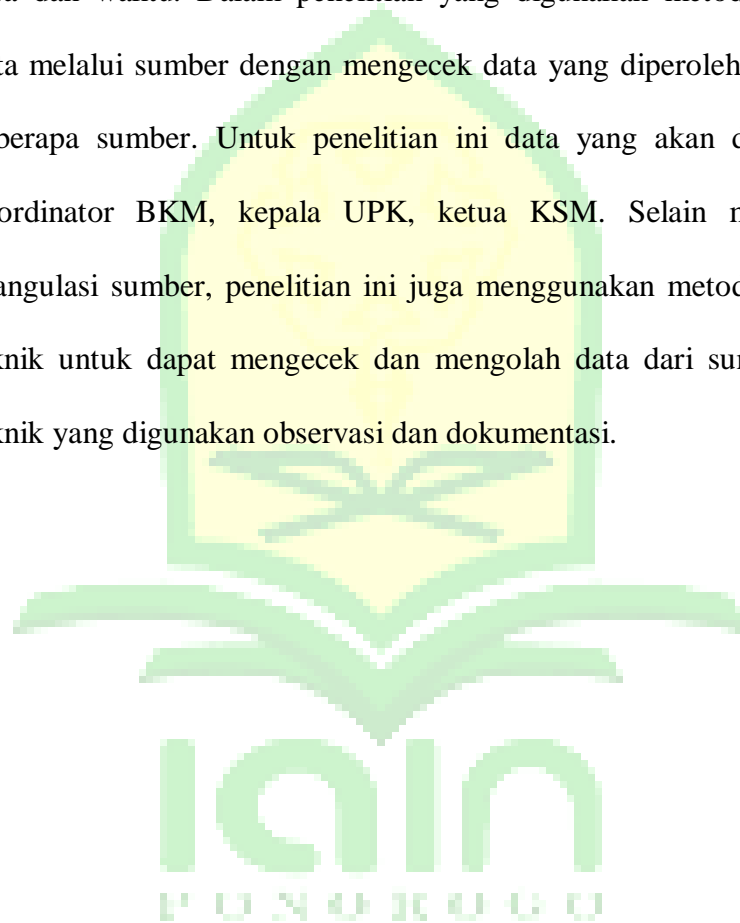
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dalam meningkatkan ketekunan peneliti menggunakan cara

¹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, 270.

membaca dari berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan berbagai temuan yang diteliti, dengan memeriksa data yang ditemukan benar / dapat dipercaya atau tidak.¹¹

3. Triangulasi Data

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat diartikan dengan cara dan waktu. Dalam penelitian yang digunakan metode triangulasi data melalui sumber dengan mengecek data yang diperoleh melalui dari beberapa sumber. Untuk penelitian ini data yang akan diperoleh dari koordinator BKM, kepala UPK, ketua KSM. Selain menggunakan triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi teknik untuk dapat mengecek dan mengolah data dari sumber dengan teknik yang digunakan observasi dan dokumentasi.



¹¹ Ibid., 274.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BKM Ngudi Mulyo

Pada tahun 2005 pemerintah dinas pekerjaan umum melakukan perencanaan kegiatan sosialisasi P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di lingkup kelurahan dan warga masyarakat Kelurahan Keniten sebagai salah satu program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dalam rangka sosialisasi tersebut berjalan selama satu tahun dengan harap semua masyarakat agar memahami maksud dari kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Keniten. Tahun 2006 pembentukan program P2KP yang melaksanakan program tersebut yaitu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).¹

Pada tahun 2006 tersebut serentak se Kecamatan Ponorogo dengan 19 Kelurahan untuk mengadakan pemilihan anggota BKM tersebut dan anggota BKM dipilih oleh warga Kelurahan masing-masing. Demikian masyarakat secara langsung dalam keseluruhan proses kegiatan BKM sejak sosialisasi, penggalan gagasan, penetapan, pelaksanaan, hingga pelesatarian kegiatan dengan terpilihnya anggota BKM yakni 13 anggota sebagai pelaksana program dan sepakat memberikan nama BKM ini dengan nama Ngudi Mulyo. Pada lembaga ini dengan hasil musyawarah

¹ Saifuddin, Wawancara, Selasa 25 Mei 2021

anggota terpilih dan musyawarah desa menetapkan formasi dalam kepengurusan terdiri dari koordinator, sekretaris, dewan pengawas dan beberapa unit-unit pengelola sesuai aturan dalam P2KP yakni Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS) dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL).²

2. Visi, Misi dan Tujuan BKM Ngudi Mulyo

a. Visi BKM Ngudi Mulyo

Terwujudnya masyarakat Kelurahan Keniten yang sejahtera dan makmur dalam potensi masyarakat yang ideal.³

b. Misi BKM Ngudi Mulyo

- 1) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Keniten, terutama masyarakat kurang mampu melalui pengembangan kapasitas penyediaan sumber daya dan membudayakan kemitraan sinergis antara masyarakat dengan pelaku lokal lainnya.
- 2) Mewujudkan masyarakat Kelurahan Keniten yang bersih dan sehat melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
- 3) Pengembangan pengelolaan pengguliran dalam peningkatan akses ekonomi bagi kelompok usaha mikro atau kecil.⁴

² Ibid.

³ Buku Panduan Operasional BKM Ngudi Mulyo Keniten, 7.

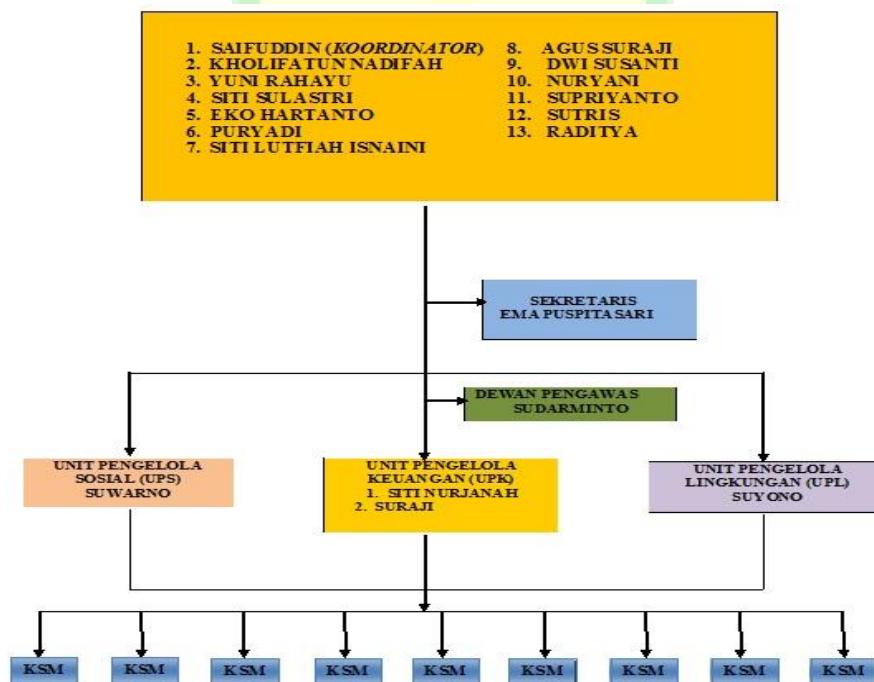
⁴ Ibid.

c. Tujuan BKM Ngudi Mulyo

Tujuan umum adalah menjamin kegiatan pelestarian lingkungan dan kelangsungan pemberdayaan masyarakat miskin pada wilayah kerja kelurahan.⁵ Tujuan khusus sebagai lembaga penyalur dan pengelola dana yang berasal dari pemerintah maupun program kerja sama untuk kegiatan penyaluran dalam dana bergulir, pembuatan sarana dan prasarana, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya.⁶

3. Struktural Organisasi BKM Ngudi Mulyo

Struktur Organisasi BKM Ngudi Mulyo
Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo
Periode 2020 -2023 ⁷



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

⁵ Saifuddin, Wawancara, Selasa 25 Mei 2021

⁶ Kholifah Nadifah, Wawancara, 27 Mei 2021

⁷ Buku Panduan Operasional BKM Ngudi Mulyo Keniten, 12.

4. Tugas BKM Ngudi Mulyo

a. Koordinator

Memiliki tugas pokok kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat dalam mengontrol kegiatan dalam operasional lembaga, pengendalian dan penyusunan kegiatan dan evaluasi dalam lembaga.

Tugas Koordinator BKM Ngudi Mulyo:⁸

- 1) menyusun rencana kegiatan program tahunan BKM Ngudi Mulyo
- 2) mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat yang lebih partisipatif
- 3) menjalin sinergitas dan kordinasi operasional antar pengurus dengan pemerintah desa dalam rangka memperkuat pembangunan partisipatif

b. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Tugas Sekretariat BKM Ngudi Mulyo:⁹

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum lembaga
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan
- 3) Pengelolaan administrasi perlengkapan

⁸ Saifuddin, Wawancara, Selasa 25 Mei 2021

⁹ Ema Puspitasari, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

c. Dewan Pengawas

Memiliki tugas pokok dalam pengawas pada Badan Keswadayaan Masyarakat setiap kegiatan operasional kelembagaan.

Tugas Dewan Pengawas BKM Ngudi Mulyo :¹⁰

- 1) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang dalam prinsip-prinsip dan mekanisme lembaga
- 3) Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus BKM
- 4) Memantau realisasi anggaran UPK dan rencana kerja BKM

d. Unit Pengelola Keuangan

Memiliki tugas pokok dalam pelayanan jasa dana bergulir kepada masyarakat sesuai pengajuan pada KSM

Tugas Unit Pengelola Keuangan : ¹¹

- 1) Melakukan pendampingan kepada masyarakat yang terdaftar dalam kelompok swadaya, melalui pemahaman prosedur pinjaman, pengisian proposal maupun pembinaan ekonomi rumah tangga masyarakat
- 2) Melakukan analisis dalam proposal mengenai proposal pinjaman yang diterima sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan

¹⁰ Sudarminto, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

¹¹ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

- 3) Mencatat setiap transaksi yang terjadi ke dalam buku transaksi dan karatu yang telah disediakan dengan mengisikan pada tanggal transaksi yang dilakukan
- 4) Melaksanakan penutupan transaksi pada setiap akhir bulan dan akhir tahun dan mencatat pada buku besar serta menyelesaikan penulisan laporan keuangan (neraca dan laba rugi)
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada KSM

e. Unit Pengelola Sosial

Memiliki tugas pokok dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti adanya kegiatan pembedahan rumah warga, santunan yatim, bantuan-bantuan sosial.¹²

f. Unit Pengelola Lingkungan

Memiliki tugas pokok dalam kegiatan lingkungan sekitar pemukiman masyarakat dengan adanya perbaikan jalan, pembuatan saluran air, memperhias taman sepanjang jalan dan pengadaan gerobak sampah di setiap lingkungan masing-masing.¹³

5. Produk dan Jasa

Dalam kegiatan UPK yang utama memberikan penyaluran dana bantuan dari pemerintah yang dikelola untuk masyarakat dalam bidang produktif tanpa jaminan. Dana tersebut merupakan dana yang dijadikan modal oleh badan keswadayaan masyarakat yang diatur dengan maksimal untuk masyarakat, sehingga dalam kegiatan UPK tidak ada

¹² Suwarno , Wawancara, Selasa 26 Juni 2021

¹³ Suyono, Wawancara, Selasa 26 Juni 2021

proses penghimpunan dana dari masyarakat. Sebagaimana berikut jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pinjaman yang dicairkan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo antara lain:¹⁴

Tabel 4.1

Nama-nama KSM dan Jumlah Pinjaman

No	Nama KSM	Jumlah Pinjaman	No	Nama KSM	Jumlah Pinjaman
1	Tani Mulyo	Rp. 7.600.000	17	Usaha Makmur	Rp.6.000.000
2	Dahlia	Rp.14.000.000	18	Bahagia	Rp.15.500.000
3	Kusuma	Rp. 8.000.000	19	Mangga Indah	Rp. 5.000.000
4	Berkah Mulya	Rp.11.000.000	20	Lancar Jaya	Rp. 9.000.000
5	Mandiri Sejahtera	Rp.17.500.000	21	Harapan Jaya	Rp.15.000.000
6	Mawar Merah	Rp. 7.000.000	22	Lancar Abadi	Rp.14.000.000
7	Manggis	Rp. 7.000.000	23	Buana Intan	Rp.13.500.000
8	Bougenville	Rp.11.000.000	24	Baris Jaya	Rp. 5.000.000
9	Sukarno Hatta	Rp.12.000.000	25	Suromenggolo	Rp. 5.320.000
10	Delima	Rp.11.000.000	26	Marem	Rp.13.500.000
11	Artha Sejahtera	Rp.12.000.000	27	Melati Jaya	Rp.12.000.000
12	Maju Makmur	Rp. 6.000.000	28	Berkah Abadi	Rp. 4.900.000
13	Sukowati Jaya	Rp.16.000.000	29	Kemuning	Rp.13.000.000
14	Semulur Jaya	Rp.16.500.000	30	Wijaya Kusuma	Rp.15.000.000
15	Durian Jaya	Rp. 2.500.000	31	Sidomulyo	Rp.14.000.000
16	Tunggorono	Rp. 7.000.000	32	Maju Mapan	Rp.12.700.000

¹⁴ Buku Pinjaman KSM tahun 2020 - 2021

Penyaluran dana berupa dana bergulir yang dikelola oleh UPK BKM ini untuk kelompok swadaya masyarakat Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo. Setiap masyarakat Kelurahan Keniten Kabupaten Ponorogo Sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa:

“Dalam proses pokok transaksi yang dilaksanakan di UPK BKM Ngudi Mulyo adalah penyaluran dana bergulir yang dikelola oleh UPK dan diberikan kepada anggota KSM yang semua masyarakat memiliki hak dalam peminjaman minimal sebesar Rp. 500.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu kredit selama 10 bulan dan jasa dari pinjaman sebesar 1.5 % setiap besaran pinjaman yang sesuai dengan syarat dan ketentuan mulai dari pengajuan proposal sampai analisa kelayakan realisasi dana”.¹⁵

Dengan itu dari ibu Siti Nurjanah anggota UPK BKM Ngudi Mulyo menambahkan bahwa:

“Selain penyaluran dana transaksi penghimpunan dana di UPK BKM Ngudi Mulyo sebenarnya tidak ada Mas, karena badan ini bukan sebagai lembaga penghimpun dana seperti halnya lembaga keuangan bank, melainkan badan penyaluran dana. Jadi disini ada program tabungan dari setiap anggota KSM yang dibayarkan saat pada pembayaran kredit dana bergulirnya, dengan tujuan untuk dapat membantu pembayaran kredit dengan hasil tabungannya, dan sisanya tabungan itu dapat diambil oleh anggota KSM pada saat terakhir transaksi kredit”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara narasumber diatas disimpulkan bahwa produk dan jasa yang dimiliki oleh UPK BKM Ngudi Mulyo yaitu bentuk penyaluran dana bergulir yang dikelola untuk KSM dengan pinjaman mulai dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- dalam jangka waktu 10 bulan dan jasa 1,5 % dari pinjaman. Bentuk penghimpun dana

¹⁵ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

¹⁶ Siti Nurjanah, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

dari setiap anggota KSM dalam bentuk tabungan dengan memiliki tujuan dapat membantu pembayaran kredit pinjaman dari hasil tabungannya.

B. Paparan Data

1. Manajemen Risiko Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo

a. Prosedur dan Proses Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

Pinjaman dana bergulir merupakan pinjaman yang berasal dari modal Badan Keswadayaan Masyarakat yang disalurkan oleh Unit Pengelola Keuangan kepada masyarakat yang memerlukan di wilayah kelurahan/desa sebagai program salah satu yang disediakan pemerintah melalui program PNPM mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pinjaman bergulir ini merupakan alternatif masyarakat dalam kegiatan perekonomian umat untuk penanggulangan kemiskinan dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penerima dana bergulir pada dasarnya adalah masyarakat kelurahan/desa dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dengan memiliki harapan untuk dimanfaatkan dalam kepentingan produktif dalam mengembangkan usaha.¹⁷ Sebagaimana yang disampaikan anggota BKM bahwa:

“Pada awal kita berdiri pada tahun 2006, dana yang kita terima untuk diolah UPK yang dijadikan modal pertama kali sebesar Rp 90.000.000 yang akan disalurkan kepada KSM untuk dikembangkan dalam usaha produktifnya. Dari dana tersebut akan

¹⁷ Pedoman Proposal Penambahan Modal KSM, 2

dibagi sesuai AD/ART 50% biaya operasional, 40% pemupukan modal, 5% kegiatan lingkungan dan 5% kegiatan sosial, oleh karena kita perlu membagi anggaran tersebut tidak untuk dana bergulir saja”.¹⁸

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan dan diketahui dana yang diterima dari pemerintah sebagai modal pertama kali pada tahun 2006 sebesar Rp. 90.000.000 dalam pengembangan usaha produktif. Dalam dana tersebut sudah diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang terbagi antara lain biaya operasional pemupukan modal, lingkungan dan sosial. Dana akan dikelola dengan kegiatan program yang disesuaikan demi keberlangsungan aspek operasional..

Ketentuan umum dalam pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo sebagai berikut:

- 1) Peminjam, sebagai kriteria anggota KSM antara lain:¹⁹
 - a) Warga yang tercatat dalam penduduk setempat
 - b) Mempunyai usaha atau akan memulai usaha
 - c) Usaha yang menguntungkan dan dapat dikembangkan
 - d) Mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman
 - e) Mendapat persetujuan dari keluarga

¹⁸ Eko Hartanto, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

¹⁹ Pedoman Proposal Penambahan Modal KSM, 4

2) Besaran Pinjaman

Besaran pinjaman merupakan ketentuan yang sangat penting dalam penyaluran dana bergulir dengan suatu kebijakan yang diterapkan. Suatu kebijakan dalam memverifikasi besaran pinjaman yang dilakukan dengan peran analisis yang cukup demi keberlangsungan bersama. Sesuai yang diungkapkan oleh Sekretaris BKM Ngudi Mulyo sebagai berikut:

“Dalam peraturan kita pemberian besaran pinjaman yang diajukan oleh anggota KSM kita perlu melakukan analisa yang mendalam untuk menyetujui besaran pinjaman yang diajukan, untuk besaran yang kita tentukan sebesar Rp. 500.000,- hingga pinjaman Rp. 3.000.000,- setiap per anggota dengan kesesuaian keadaan anggota dalam kemampuan proses pengembalian dana”.²⁰

Menanggapi pernyataan tersebut Koordinator UPK BKM Ngudi Mulyo menambahkan bahwa:

“Sebenarnya begini, untuk jumlah besaran pinjaman lebih difokuskan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga fokus pada anggota KSM yang menerima. Jadi dalam jumlah besaran pinjaman yang dilakukan untuk keberhasilan program dana bergulir akan dikembangkan sebagai usaha yang dimilikinya”.²¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian besaran pinjaman dana untuk anggota KSM dengan banyak melakukan analisa untuk menyetujui pinjaman. Anggota KSM mendapatkan besaran pinjaman yang diajukan dan disetujui dengan kemampuan pengembalian. Dalam jumlah besaran tersebut bermaksud untuk mewujudkan keberhasilan masyarakat

²⁰ Ema Puspitasari, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

²¹ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

yang tergabung dalam anggota KSM dengan dapat mengembangkan usahanya lebih progresif dan produktif.

Penetapan besaran pinjaman anggota KSM selama ini berdasarkan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi dalam menerapkan perlu lebih detail mengetahui kemampuan pengembalian anggota. Seperti yang diungkapkan oleh anggota UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa:

“Anggota KSM dalam melakukan pengajuan besaran pinjaman yang disetorkan ke kita telah disetujui berdasarkan penilaian proposal yang diajukan dan beberapa berkas yang dibawa. Besaran yang kita berikan dapat mempermudah dalam kemampuan anggota membayar kembali pinjaman. Dalam pinjaman berikutnya di lihat bagaimana dari catatan UPK dalam proses jadwal pengembalian yang lebih baik”.²²

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan besaran pinjaman yang diajukan oleh KSM dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan data dalam proposal sehingga dalam pihak UPK dapat menyesuaikan dengan jenis kebutuhan dalam pengembangan usaha, pihak UPK akan melakukan analisa tahap realisasi pinjaman berpatokan dalam catatan angsuran dan proses ketepatan dalam jadwal pengembalian yang baik.

3) Jangka dan Jasa Pinjaman

Dalam pengimplementasian program adanya jasa pinjaman yang baik maka dibutuhkan konsep yang baik, sehingga dampak yang timbul akan baik pula. Jasa disini berupa bentuk pengelolaan

²² Siti Nurjanah, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

dana yang terlibat dalam implementasi program pinjaman bergulir. Sebagaimana yang dilakukan UPK BKM Ngudi Mulyo menjelaskan bahwa:

“Untuk jasa pinjaman dalam pinjaman dana bergulir yang selama ini kita lakukan dalam setiap bulan yang dihitung dari besaran pokok pinjaman diberikan jasa pinjaman keseluruhan KSM sebesar 1,5% dengan jangka waktu pembayaran selama 10 bulan”.²³

Dewan pengawas BKM Ngudi Mulyo menambahkan, bahwa:

Dalam jasa pinjaman yang sudah ditetapkan yang disetujui struktural BKM dengan upaya biaya operasional pinjaman UPK, biaya risiko pinjaman dan memelihara nilai modal, akan tetapi dengan adanya jasa para anggota biasanya hanya membayar kewajiban pokok saja”.²⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa pinjaman yang direalisasikan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam menjaga kestabilan dana memberikan jasa sebesar 1,5%, dalam jangka 10 bulan, tetapi dalam program jasa pinjaman tersebut belum keseluruhan dalam membayar jasa pinjaman dikarenakan dari anggota KSM mengalami keberatan dalam pembayaran jasa yang ditetapkan.

4) Jaminan Peminjaman

Jaminan dalam peminjaman dana bergulir dengan menggunakan KTP atau Kartu Keluarga (KK) setiap anggota kelompok swadaya masyarakat, Namun ada tanggung renteng,

²³ Ibid.

²⁴ Sudarminto, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

artinya yang bertanggungjawab adalah pihak keseluruhan dalam setiap anggota kelompok untuk saling bekerja sama. Ketua UPK BKM Ngudi Mulyo menjelaskan bahwa:

“Teknik tanggung renteng yang diberikan oleh UPK kepada KSM adalah cara pembayaran kredit yang pembayarannya ditanggung oleh semua anggota penerima kredit. Dengan cara ini untuk mengantisipasi terjadi tunggakan angsuran anggota. Tanggung renteng untuk peminjam yang telah membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa peminjam. Sehingga bila ada salah satu anggota ada yang bermasalah dalam pembayaran pinjaman maka semua anggota wajib menanggung masalah bersama-sama untuk membayar pinjaman itu”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan jaminan peminjaman yang diberikan dengan berkas KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), adapun yang menjadi berbeda dari lembaga keuangan lainya lembaga BKM Ngudi Mulyo menerapkan jaminan pinjaman melalui sistem tanggung renteng yang dikelola secara bersama anggota kelompok dengan tujuan permasalahan yang dialami dalam kelompok diselesaikan dengan musyawarah yang baik sebagai kelompok yang integritas.

Dalam proses pemberian dana bergulir telah disusun beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tahap Pengajuan Pinjaman

Pada tahapan ini proses pengajuan pinjaman dana bergulir yang dilakukan secara musyawarah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam memberikan data kebutuhan usaha

²⁵ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

untuk menentukan jumlah pinjaman dana yang akan diajukan oleh masing-masing anggota KSM. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris BKM Ngudi Mulyo bahwa:

“Dalam proses pengajuan pinjaman pada tahap awal kita memberikan penjelasan ketentuan yang harus dipatuhi dan beberapa dokumen dalam pengajuan pinjaman serta memberikan gambaran output yang diperoleh dalam hasil pengembangan usaha yang sudah di kelola dari pemanfaatan dana bergulir. Persyaratan yang disiapkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) beserta anggota untuk pengajuan pinjaman diantara lain surat permohonan pinjaman, profil kelompok proposal penambahan modal KSM, Rencana Usaha Anggota (RUA), *Fotocopy* Kartu Keluarga masing anggota KSM, *Fotocopy* KTP masing anggota KSM, dan surat persetujuan keluarga”.²⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan tahap pengajuan pinjaman merupakan tahap memberikan gambaran usaha yang akan dikembangkan melalui dana bergulir dengan menyetorkan beberapa dokumen persyaratan pendukung diantaranya RUA, FC KTP, FC KK dan surat persetujuan keluarga dalam kelompok swadaya masyarakat dan proposal gambaran usaha.

2) Tahap Pemeriksaan

Pada tahapan ini petugas UPK melakukan proses pemeriksaan dokumen pengajuan pinjaman yang telah diajukan secara administrasi dan survei lokasi seluruh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sebagaimana yang diungkapkan Koordinator BKM Ngudi Mulyo menjelaskan bahwa:

²⁶ Ema Puspitasari, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

“Dalam tahapan pemeriksaan calon anggota KSM kita juga melihat kondisi lapangan di bantu oleh ketua RT setempat, untuk dapat memperoleh data konkrit serta mengetahui dalam kelayakan anggota KSM serta untuk memperoleh informasi dalam pengembalian pinjaman”.²⁷

Koordinator UPK BKM Ngudi Mulyo menambahkan proses pemeriksaan bahwa:

“Proses pemeriksaan yang kita lakukan juga menganalisa terkait dokumen-dokumen yang dikumpulkan dalam persyaratan pendaftaran calon anggota KSM, kita lihat seberapa kondisi ekonomi keluarga yang akan ditanggung dengan melihat rencana usaha yang dibangun atau dikembangkan, dari hasil analisa dokumen akan kita kumulatifkan dengan analisa lapangan”.²⁸

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan pada tahap pemeriksaan melalui beberapa pemeriksaan antara lain pemeriksaan secara administrasi dengan melakukan analisa dokumen-dokumen yang diajukan berdasarkan kelayakan pengajuan. Pemeriksaan lapangan tahapan lapangan pihak UPK mengecek secara langsung kondisi ekonomi kelayakan calon anggota KSM dengan bantuan informasi melalui ketua RT (Rumah Tangga).

3) Tahap Putusan Pinjaman

Dalam tahap ini akan menentukan bagaimana hasil dari beberapa analisa yang dilakukan UPK BKM Ngudi Mulyo untuk dapat realisasi dana pinjaman bergulir. Menurut

²⁷ Saifudin, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

²⁸ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

Koordinator UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa tahap putusan pinjaman yaitu:

“Setelah melalui tahap pemeriksaan, kita akan bermusyawarah untuk memutuskan hasil dari analisa apakah berhak untuk di pinjami atau tidak. Kita akan memberikan persetujuan atas permohonan pinjaman jika tidak menemukan indikasi permasalahan dan jika sebaliknya dalam proses analisa kita menemukan adanya kejanggalan akan kami tolak dan kemudian berkas akan diselesaikan kemudian hari”.²⁹

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap putusan pinjaman memberikan hasil pemeriksaan dan musyawarah kelayakan yang diberikan oleh pihak UPK kepada calon anggota KSM dengan beberapa pertimbangan yang tidak adanya permasalahan dalam jangka pinjaman dana dikemudian hari.

4) Tahap Realisasi Pinjaman

Pada tahapan realisasi pinjaman permohonan pinjaman yang telah disetujui oleh petugas UPK perlu menyiapkan beberapa dokumen untuk pencairan pinjaman yang akan diisi Ketua KSM dalam Pencairan keseluruhan anggota. Menurut Koordinator UPK BKM Ngudi Mulyo dalam realisasi pinjaman mengatakan bahwa:

“Tahap ini kita akan memberikan realisasi pinjaman dengan ketua KSM dengan melengkapi dokumen dalam persyaratan pencairan dana seperti surat pengakuan hutang, materai 6.000, surat pernyataan bersedia tanggung renteng, dan kartu pinjaman. Selain itu kita akan lebih menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan pinjaman dana bergulir termasuk

²⁹ Ibid.

ketentuan bahwa pinjaman bergulir adalah pinjaman yang wajib dibayar kembali dan bukan hibah”.³⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam tahap realisasi pinjaman, keputusan musyawarah memberikan hasil analisa dengan realisasi pinjaman yang melengkapi beberapa dokumen pencairan antara lain surat pengakuan hutang bermaterai 6.000 dan surat kesanggupan tanggungan jaminan yang akan disetujui dengan sistem tanggung renteng dalam keseluruhan anggota dalam kelompok.

5) Tahap Pembinaan Pinjaman

Proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas UPK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana pinjaman dan mengingatkan untuk kewajiban angsuran anggota KSM. Sebagaimana yang diungkapkan oleh anggota UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa:

“Dalam mengatasi penyelewengan dana, kita biasa melakukan pengontrolan sekaligus pembinaan kepada anggota KSM yang baru saja pencairan dana pinjaman, pembinaan yang kita lakukan dengan mengunjungi dalam rangka silaturahmi dengan anggota KSM untuk menjaga keutuhan hubungan yang baik, kita mulai melakukan pembinaan 1 bulan setelah realisasi dana pinjaman dan lebih memantau perkembangan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai dengan perjanjian awal pinjaman”.³¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan tahap pembinaan pinjaman yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi

³⁰ Ibid.

³¹ Siti Nurjanah, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

Mulyo dengan mengontrol dan pembinaan kepada anggota KSM untuk melihat seberapa pengelola dana yang diberikan dalam mengelola usaha dan hasil yang diperolehnya, selain itu juga dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali untuk menjaga hubungan silaturahmi dalam pembinaan setelah pencairan dana yang direalisasikan.

6) Tahap Pembayaran Pinjaman

Menurut anggota UPK BKM Ngudi Mulyo dalam tahap pembayaran pinjaman dengan beberapa alur yaitu:

“Proses pembayaran yang dilakukan oleh anggota KSM biasanya dibayarkan pada saat jatuh tempo yang ditentukan dalam setiap bulannya dengan membayar angsuran pinjaman pokok, jasa serta tabungan yang dikendaki oleh peminjam, kemudian kita akan memberikan rekapan pembayaran melalui kartu pinjaman. Kita tidak lupa sering mengingatkan bahwa pembayaran dilakukan pada waktu yang tetap agar tidak terjadi penunggakan pembayaran dan kita mengingatkan apabila dalam kelompok mengalami terjadi masalah agar segera di musyawarah terlebih dahulu kemudian memberitahu kita”.³²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam tahap pembayaran pinjaman dilaksanakan saat jatuh tempo pembayaran setiap bulan dengan membayar pokok pinjaman, jasa pinjaman dan tabungan ketika menginginkan. Langkah UPK BKM Ngudi Mulyo sering mengingatkan sebelum jatuh tempo pembayaran demi mengurangi permasalahan penunggakan pembayaran.

³² Ibid.

Proses tahapan pemberian dana bergulir dilakukan dengan beberapa proses yang harus dilakukan oleh anggota KSM untuk dapat menerima hasil pengajuan dana bergulir untuk pengembangan usaha yang lebih produktif. Berikut beberapa pandangan anggota KSM dalam proses pengajuan pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo sebagai berikut:

Warga RT 2 RW 1 Lingkungan Sablak mengatakan bahwa:

Menurut saya pada permulaan mengetahui program P2KP dari suatu perkumpulan masyarakat diberikan sosialisasi program pinjaman dana bergulir dari BKM dan perangkat Kelurahan Keniten mengatakan tujuan memberikan berbagai macam informasi mengenai program pinjaman dan bergulir dan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal tersebut, kemudian saya dan masyarakat sekitar mengikuti program dengan membentuk kelompok swadaya dalam kelompok saya berjumlah 5 orang Dalam proses pengajuan pinjamannya perlu melalui beberapa tahap yang dilalui guna untuk mengetahui latar belakang dari calon anggota KSM dan tahapan ini cukup baik dan transparansi dan tidak hanya berhenti pada saat selesai pencairan pinjaman akan tetap terus berlanjut dalam pemantauan penggunaan dana bergulir ini.³³

Ketua KSM Wijaya Kusuma menambahkan bahwa:

Dalam persyaratan pengajuan pinjaman ke BKM tidak terlalu rumit seperti peminjaman di bank, hanya saja yang dibutuhkan dokumen pengajuan *fotocoy* KTP, *fotocopy* KK, surat persetujuan keluarga dan rencana usaha anggota. Tahapan yang di lakukan untuk mencapai pencairan mudah dipahami oleh masyarakat desa seperti saya yang cuma intinya tidak mau ribet untuk mengurusinya. Proses pinjamana dana bergulir ada beberapa yang perlu saya dan anggota kelompok perhatikan dalam jumlah minimal dan maksimal anggota, jumlah dana yang akan dipinjam, besaran jasa yang ditanggung selain tanggungan wajib pokok pinjaman.³⁴

³³ Ahmad Senen, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021.

³⁴ Suryani, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021

Dari hasil wawancara narasumber anggota KSM dapat disimpulkan bahwa informasi adanya program pinjaman dana bergulir disampaikan pada perkumpulan masyarakat dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam teknis pinjaman dana tersebut. Proses tahapan pengajuan yang baik tidak ada kerumitan dan kebingungan mudah dipahami calon anggota KSM dalam proses pengumpulan syarat pendaftaran pengajuan. Dapat diperhatikan jumlah anggaran tidak harus sama keseluruhan anggota serta transparansi pengelolaan dana bergulir tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pengajuan pinjaman dana bergulir peneliti dapat memberikan kesimpulan melalui skema tahapan pinjaman dana bergulir sebagai berikut:



Gambar 4.2

Skema Tahapan Pinjaman Dana Bergulir

1. Pengajuan pinjaman dilakukan pada tahap awal dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung yang menjelaskan dari gambaran usaha yang akan dikembangkan. Dokumen persyaratan

yang dilengkapi yaitu surat permohonan pinjaman, profil usaha, proposal penambahan modal, fotocopy KK dan KTP dan surat persetujuan keluarga.

2. Pemeriksaan dilakukan secara administrasi dan fisik (lokasi), untuk melihat kondisi calon anggota KSM dengan data konkrit lapangan dalam menentukan apakah layak dalam pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditanggung. Dalam pemeriksaan dokumen menganalisa kelengkapan dan kebenaran pengisian pinjaman dan pemeriksaan lapangan ditujukan sebagai kelayakan anggota untuk memperoleh informasi dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman.
3. Pemutusan pinjaman merupakan hasil dari analisa dokumen-dokumen dan kondisi fisik yang dimusyawarahkan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam persetujuan permohonan pinjaman, sehingga apabila dari hasil analisa terdapat permasalahan pada hal-hal yang diragukan maka dilakukan pemeriksaan ulang dan dapat memberikan pemutusan pinjaman persetujuan atau penolakan
4. Dalam realisasi pinjaman perlu menyiapkan dokumen sebagai syarat dalam pencairan pinjaman dana, surat pengakuan hutang, materai 6000, surat pernyataan bersedia tanggung renteng. KSM juga perlu memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut. Pihak UPK memberikan

penjelasan kembali mengenai besar pinjaman, tujuan, jangka waktu, dan pengembalian pinjaman wajib dibayarkan karena bukan hibah.

5. Dalam pencegahan permasalahan yang terjadi dalam dana pinjaman dilakukan pengontrolan dan pembinaan dengan mengunjungi secara langsung untuk silaturahmi dalam mengingatkan kewajiban melakukan pembayaran pinjaman serta mengetahui perkembangan usaha yang dikembangkan melalui dana pinjaman bergulir tersebut.
6. Pembayaran dilakukan setiap tempo yang disepakati dalam setiap bulan dengan pembayaran angsuran pinjaman pokok, jasa pinjaman dan tabungan sehingga pembayaran akan direkap dalam data kartu pinjaman. Hal itu juga dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo sebelum pada masa tempo pembayaran untuk mengingatkan pembayaran kewajibannya dan apabila terjadi permasalahan dalam pembayaran segera dilakukan musyawarah dalam tanggung renteng.

b. Proses Manajemen Risiko

Dalam lembaga swadaya masyarakat yang melalui program bergerak dalam kegiatan pembiayaan keuangan pasti akan berhadapan dengan risiko-risiko. Risiko yang dapat dialami dapat mengakibatkan kemacetan likuiditas, apabila tidak dikelola atau

dikendalikan dengan baik. Manajemen risiko pada pinjaman dan bergulir oleh UPK BKM Ngudi Mulyo yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Menurut Bapak Suraji selaku Koordinator UPK disampaikan bahwa identifikasi risiko yang dilakukan UPK BKM Ngudi Mulyo yaitu:

“Untuk mengidentifikasi risiko tersebut telah dilakukan oleh kita dengan analisa karakter anggota KSM pada saat kegiatan survei lapangan, dimana dalam karakter tersebut dapat mengetahui karakter dari orang tersebut dan juga diketahui oleh ketua RT yang menyatakan bahwa warganya bisa dijamin untuk diberikan pinjaman sekaligus dengan legalitas tanda tangan ketua RT. Calon anggota KSM harus memiliki kegiatan pengembangan usaha, untuk diketahui analisa keuangan yang didapatkan dalam setiap bulannya yang akan melakukan peminjaman untuk melakukan pengembalian pinjaman nantinya.”³⁵

Menanggapi pernyataan tersebut Ibu Siti Nurjanah sebagai anggota UPK menambahkan bahwa:

“Kita harus mengetahui bagaimana karakter, modal, dan kondisi ekonomi anggota KSM. Karakter dari orang yang akan melakukan pinjaman dana bergulir, terus karakter tersebut dapat kita lihat dari sifat keseharian dari calon orang yang akan melakukan pinjaman. Setelah karakter itu dilihat selanjutnya berupa modal untuk mengetahui kemampuan dari anggota KSM. Dari modal itu ya dilihat dari laporan keuangan. Kondisi ekonomi, biasanya melihat kondisi global, kadang usaha tersebut dipengaruhi dari faktor alam maupun kebijakan dari pemerintah.”³⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko yang dilakukan UPK BKM Ngudi Mulyo

³⁵ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

³⁶ Siti Nurjanah, Wawancara Selasa 25 Juni 2021

dengan analisa karakter calon anggota KSM mulai dari analisa metode pengembangan usahanya, kondisi ekonomi, analisa keuangan dengan itu dapat memastikan kesediaan dalam proses pengembalian pinjaman. Karakter seseorang dapat dilihat dari sifat keseharian yang menjadi modal kemampuan anggota KSM yang menjadi kondisi global.

2. Pengukuran Risiko

Menurut Ibu Siti Nurjanah selaku pengelola keuangan UPK mengenai pengukuran risiko yang dilakukan UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa:

“Untuk pengukuran risiko, pada proses pengukuran peminjaman dana bergulir yang kita terapkan semua anggota KSM porsi yang sama dengan melihat bagaimana proses pembayaran yang dilakukan anggota KSM dalam memenuhi kewajiban, sampai terjadi keterlambatan hingga macet. Untuk pengukuran kredit yang bermasalah kita memberikan kelonggaran kepada pihak anggota KSM untuk tetap melakukan pembayaran kewajiban atau pokoknya saja sampai lunas tanpa melakukan pembayaran jasa maupun tabungan sehingga bebas pembayaran tanpa adanya tenggang batas waktu. Dalam perkembangan risiko kredit bermasalah dari tahun ke tahun juga ada yang tetap mengalami kemacetan dan ada yang mulai bergerak kembali. Kita dari UPK ada bentuk reward khusus kepada anggota KSM yang dilihat dari proses pembayaran lancar dalam 5 bulan berturut-turut³⁷”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan proses pengukuran pinjaman memiliki kadar yang sama seluruh anggota KSM dalam memenuhi kewajiban akan tetapi dalam pengukuran kredit bermasalah diberikan kelonggaran dalam

³⁷ Ibid.

pembayaran kewajiban tanpa adanya batas waktu. Perkembangan risiko yang terjadi sudah banyak adanya perubahan dan mampu mengatasi risiko demi kelancaran pengembangan usaha produktifnya.

3. Pemantauan Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sudarminto selaku dewan pengawas BKM Ngudi Mulyo Keniten memaparkan berupa pemantauan dan pengawasan risiko kredit yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo yaitu:

“Dalam pemantauan risiko seharusnya dilakukan oleh bagian dewan pengawas dari BKM tetapi hingga saat ini masih belum terlaksana sesuai job decription hanya dilakukan oleh anggota BKM dan para petugas UPK yang melakukan pemantauan dilapangan. Peminjaman dana bergulir yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, kita akan mendatangi atau silaturahmi anggota KSM, sehingga kita dapat memantau perkembangan usaha yang dikembangkannya dengan sedini mungkin. Selain mendatangi secara langsung kita melakukan komunikasi dengan anggota KSM melalui media telepon maupun *whatapps* untuk memberikan kabar keadaan dan jadwal waktu pembayaran.”³⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan risiko yang dilakukan UPK BKM Ngudi Mulyo belum berjalan dengan baik, karena belum adanya kesesuaian dalam job deskripsi sehingga terjadi job ganda dalam pengawasan dan pemantauan anggota KSM realisasi dana pinjaman. Proses ini dilakukan secara rutin 1 bulan sekali dengan mengunjungi rumah atau lokasi pengembangan usaha

³⁸ Sudarminto, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

anggota KSM, terkadang juga dilakukan melalui media online *whatapps* untuk penjadwalan pembayaran.

Menanggapi pernyataan tersebut Bapak Suraji Selaku Koordinator UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa:

“Dengan pola pemantauan yang kita lakukan masih belum maksimal kepada anggota KSM sehingga terjadi permasalahan kredit macet. Jumlah keseluruhan anggota KSM sebanyak 215 orang dari 32 KSM dari beberapa permasalahan kendala dalam pembayaran kembali pinjaman saat jatuh tempo yang perlu memberlakukan kebijakan khusus kepada anggota KSM yang bermasalah. Dari total keseluruhan anggota yang mengikuti program pinjaman dana bergulir periode 2019 – 2021 terdapat 25 orang yang bermasalah dari beberapa faktor permasalahan yang mereka alami dengan ini tingkat kredit macet yang kita alami sebesar 12 %. Demikian besaran tersebut kita akan kelola semaksimal mungkin sehingga dana bergulir tetap tersampaikan kepada anggota KSM lainnya”³⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pemantauan yang dilakukan belum maksimal terjadi permasalahan kredit macet pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo dalam jangka periode 2019 – 2021 muncul tingkat kredit macet dari jumlah anggota keseluruhan KSM adalah 12 % yang terus dikelola dan dimaksimal tingkat kredit tersebut.

4. Pengendalian Risiko

Menurut Ibu Yuni Rahayu selaku anggota BKM Ngudi Mulyo, pengendalian risiko yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo bahwa:

³⁹ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

“Penanganan pengendalian risiko yang kita terapkan sebelum terjadinya kemacetan pembayaran anggota KSM, kita selalu melihat kondisi ekonomi anggota KSM dan kita akan melakukan mitigasi pencegahan terjadinya kemacetan seperti melakukan penagihan yang intensif, selain itu kita memberikan kebijakan dalam kelonggaran kepada KSM untuk melakukan musyawarah terhadap tanggung renteng yang dilaksanakan dalam satu kelompok. Kita juga selalu pro aktif kepada keseluruhan anggota KSM dalam keadaan keuangannya, jika ada kendala kita akan bimbingan secara intensif untuk mengatasi kemacetan, karena tujuan kita bagaimana seluruh masyarakat mencapai kesejahteraan”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan proses pengendalian risiko kredit dengan pencegahan mitigasi kemacetan pembayaran secara intensif. Kebijakan kelonggaran diberikan kepada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) melalui sistem tanggung renteng dalam pro aktif melihat keadaan keuangan usaha demi mengatasi terjadi kemacetan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa narasumber bahwa penerapan manajemen risiko pada proses peminjaman dana bergulir yang dilaksanakan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo sudah dapat berjalan baik sesuai dalam tahapan manajemen risiko. *Pertama*, identifikasi risiko dalam mengetahui *character* (karakter) anggota KSM dalam hal kemampuan peminjaman untuk memenuhi kewajiban pengembalian dana pada waktu yang sudah ditentukan. *Capacity* (kemampuan) dan *capital* (modal) anggota KSM yang melakukan peminjaman untuk melunasi tanggungannya, maka dilihat dari analisis laporan keuangannya. Kita harus mengetahui

⁴⁰ Yuni Rahayu, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

bagaimana setiap bulan omset yang dimiliki oleh anggota KSM dalam pengembangan usaha yang akan melakukan pembiayaan. Jika omset yang dimiliki setiap bulannya baik maka kemungkinan besar nasabah tersebut bisa melakukan angsuran setiap bulan, tetapi jika omset setiap bulan tidak menentu mengakibatkan macet dalam angsuran, condition of economy dapat berpengaruh terhadap usaha peminjam. Jika kondisi perekonomian memburuk maka dapat mengancam usaha peminjam tersebut sehingga itu dapat berdampak pula pada penurunan pendapatan, dan menyebabkan kemampuan mengembalikan pinjaman juga akan turun.

Kedua, pengukuran risiko dengan penerapan semua anggota dengan porsi yang sama dalam proses pembayaran yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban, untuk khusus kredit bermasalah kita memberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran kewajiban pokok sampai lunas tanpa pembayaran jasa dengan bebas tenggang batas waktu. *Ketiga*, pemantauan risiko yang dilakukan dengan kunjungan silaturahmi anggota KSM di rumah masing-masing setiap 1 bulan sekali dan komunikasi melalui media telepon. *Keempat*, pengendalian risiko yang dilakukan sebelum terjadinya nasabah mengalami kemacetan pembayaran maka melakukan mitigasi dan pencegahan risiko dengan penagihan secara intensif dan pro aktif dalam komunikasi KSM.

2. Dampak Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman

Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo

a. Dampak Manajemen Risiko Kredit

Suatu keberhasilan program lembaga merupakan tujuan kritis melalui proses perencanaan strategik. Dengan tujuan strategik dipilih menentukan kegiatan atau program yang mengikat sumber daya dalam jangka waktu yang panjang.⁴¹ Dalam lembaga pengelola keuangan memiliki strategi untuk dapat mempertahankan kestabilan keuangan lembaga, UPK BKM Ngudi Mulyo melakukan manajemen risiko kredit dalam proses pemberian pinjaman dana bergulir sesuai dengan prosedur pelaksanaan manajemen risiko, hal tersebut masih terjadi permasalahan kredit macet anggota KSM yang menjadi kendala yang dialami oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam penyaluran program pinjaman dana bergulir.

Penjelasan Ibu Yuni Rahayu mengenai permasalahan kredit macet yang terjadi dalam pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo yaitu:

“Permasalahan kredit yang terjadi terdapat 2 pembagian permasalahan yaitu permasalahan macet atau penunggakan dan permasalahan terjadi musibah. Masalah macet atau nunggak itu berasal dari anggota KSM itu sendiri yang menjadi penyebab masalah yang dialami lingkup internal seperti belum mampu mengelola keuangan pendapatan, kebutuhan dalam usaha lebih besar dibandingkan hasil dari penjualan, lingkup eksternal harga bahan baku usaha mengalami kenaikan, dan perubahan kebijakan dari pemerintah. Masalah macet karena terjadi musibah antara lain gagal panen tanaman yang budidaya terjadi penyerangan hama atau

⁴¹ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta, BPFE, 2015), 109.

peristiwa gagal ternak terjadi ini hewan ternak mati dadakan tanpa adanya tanda-tanda penyakit dari hewan ternak, terjadi peristiwa kebakaran usaha, dan terjadi tindakan kriminal perampokan barang-barang usaha. Dengan kondisi keuangan usaha tersebut akan sangat tidak terkontrol, kita perlu memperhatikan kondisi permasalahan yang terjadi dalam penanganannya.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pinjaman dana bergulir terdapat permasalahan dalam penghambatan pembayaran yang terjadi ketika kondisi keuangan usaha yang tidak cukup untuk pembayaran karena pendapatan yang minim, adapun yang terjadi ketika anggota KSM dalam pengelolaan keuangan usahanya kurang memadai sehingga pendapatan tidak bisa dialokasi antara kebutuhan penjualan maupun kewajiban yang ditanggungnya. Permasalahan pun juga terjadi diluar kendali anggota KSM seperti gagalnya panen atau ternak karena adanya peristiwa yang terjadi penyerahan wabah hama atau mendadak mati pada hewan ternak, terkadang permasalahan eksternal disebabkan karena fenomena alam atau bencana yang menimpa anggota.

Program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dengan menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat dalam kekuatan modal usaha. Beberapa wawancara dengan anggota KSM yang melakukan transaksi pinjaman dana bergulir yaitu:

Menurut Ibu Suprapti warga Rt 01 Rw 02 Lingkungan Sablak dan Ketua KSM Wijaya Kusuma mengatakan bahwa:

⁴² Yuni Rahayu, Wawancara, 26 Mei 2021.

Saya mengikuti program dana bergulir ini sudah lama sekitar tahun 2007 lalu pada saat awal BKM berdiri dulu masih program P2KP, saya tergabung dalam KSM Wijaya Kusuma yang terdapat 6 anggota dengan beberapa macam usaha yang dijalankan. Jumlah dana pinjaman saya sekarang Rp. 3.000.000,- untuk dijadikan modal usaha warung nasi pecel saat pagi hari, selain itu juga dibuat untuk membeli bahan-bahan dan merenovasi warung nasi pecel saya. Adanya program pinjaman dana bergulir ini cukup membantu saya dalam operasional warung saya yang dulu hanya jualan didepan teras rumah sekarang sudah bisa ada warung sendiri selain itu juga bisa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya. Setiap bulannya saya melakukan wajib bayar kembali pinjaman sebesar Rp. 330.000 yang sudah jasanya 1,5 % dalam jangka waktu 10 bulan angsuran. Alhamdulillah dalam kelompok saya semua anggota pembayaran tepat pada waktunya, senangnya saya ketika menjelang hari raya diberikan bonus dari UPK untuk anggota KSM yang selalu lancar dalam pembayaran.⁴³

Ketua KSM Mandiri Sejahtera yang mengikuti program dana bergulir ini juga berpendapat bahwa:

Soal program pinjaman dana bergulir ini saya mengikuti sudah lama sekitar 6 tahun lalu selama ini cukup membantu perekonomian usaha toko kelontong saya yang sebelumnya dalam menjalankan usaha ini masih menggunakan dana pribadi yang pendapatannya Rp. 70.000,- per hari, kemudian untuk mengembangkan usaha yang memiliki propek baik ke depan saya mengikuti program ini melalui informasi ibu PKK dan mengajukan pinjaman Rp. 3.000.000 dalam jasa 1,5 % dan jangka waktu 10 bulan. Hingga saat ini setelah mengikuti program bisa terus mengembangkan stok barang yang ada ditoko dan kondisi masyarakat Keniten udah mulai sejahtera angka kemiskinan dan terciptanya lapangan pekerjaan.⁴⁴

Menurut pandangan anggota KSM Semulur Jaya mengungkapkan bahwa:

Kalau mengenai program pinjaman dana bergulir itu saya juga mengikuti dalam perkembangan usaha jual beli ayam, sebenarnya program ini cukup membantu masyarakat pelaku UKM di wilayah Kelurahan Keniten, sehingga pendapatan masyarakat semakin merata dan berkurang angka pengangguran, tetapi menjadi

⁴³ Suprpti, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021.

⁴⁴ Siti Lutfiyah Isnaini, Wawancara, 15 Juni 2021

kekurangan adanya anggota yang sudah memperoleh dana untuk mengembangkan usaha dan ketika saat pembayaran mengalami kemoloran dan akan mengakibatkan kemacetan justru hal itu juga dapat mempengaruhi dalam 1 kelompok proses pinjaman selanjutnya karena di UPK BKM Ngudi Mulyo menerapkan tanggung renteng.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku KSM dapat disimpulkan dalam dampak masyarakat adanya pemberian program pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo sebagai berikut:

1. Mampu mendirikan dan mengembangkan usaha
2. Mensejahterakan UKM berbagai sektor pada wilayah Kelurahan Keniten
3. Pemerataan pendapatan domestik masyarakat
4. Terciptanya lapangan pekerjaan berbagai sektor usaha
5. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kelurahan Keniten

b. Penanganan Dampak Manajemen Risiko Kredit

Tindak lanjut pada anggota KSM yang mengalami terjadinya kredit macet dari beberapa permasalahan dilakukan penanganan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo. Hal ini disampaikan oleh Bapak Suraji selaku Koordinator UPK BKM Ngudi Mulyo dalam penanganan masalah kredit yaitu:

- a. KSM yang mengalami risiko kredit, macet atau nunggak

“Untuk yang pertama masalah anggota yang mengalami macet atau nunggak penanganan kita dari UPK BKM Ngudi Mulyo melakukan identifikasi permasalahan penyebab dari kredit macet tersebut. Selanjutnya kita musyawarah bersama

⁴⁵ Bijanto , Wawancara, 15 Juni 2021

anggota kelompok, kemudian penagihan secara rutin terus-menerus dan ketika penagihan rutin tidak ada pengaruh dalam pembayaran dan tetap mengalami kemunduran nunggak maka dari kita akan perlakuan khusus *reconditioning* yang kita berikan dengan kelonggaran dalam membayar atas pokok kewajibannya tanpa jasa bunga yang ditanggung. Selain itu kita juga lebih menegaskan kepada anggota KSM ketika awal perjanjian tidak ada jaminan barang hanya dengan data KK dan KTP saja, karena pinjaman ini bukanlah dana yang diberikan untuk hibah melainkan dana yang bergulir kepada seluruh masyarakat Keniten”.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan terjadi permasalahan risiko kredit dari anggota yang mengalami kemacetan atau penunggakan, proses penanganan dilakukan secara bersama pihak UPK dengan anggota kelompok dengan penagihan secara rutin dalam proses khusus *reconditioning* membayar pokok pinjaman hingga selesai tanpa adanya jasa pinjaman yang dibebankan.

b. KSM yang mengalami musibah

“Setiap usaha yang dijalankan anggota KSM kan tidak selalu meningkat terkadang juga mengalami penurunan pendapatan akibat muibah yang dialaminya, musibah bisa datang tiba-tiba karena adanya musibah tidak dapat melakukan pembayaran secara rutin. Jadi dalam penanganan yang kita lakukan kepada anggota KSM yang mengalami musibah tidak jauh beda dengan macet, kita tetap memberikan keringanan toleransi dan *resheduling* dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran dengan pembayaran pokok kewajiban selain itu kita juga tidak mengurangi jumlah angsuran pembayaran”.⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi karena mengalami musibah yang

⁴⁶ Suraji, Wawancara, 26 Mei 2021.

⁴⁷ Ibid.

menimpa anggota KSM seperti kegagalan panen, terbakar lokasi usaha dan lainnya, demikian penanganan permasalahan yang dilakukan dengan metode *resheduling* yang memberikan kelonggaran dalam pembayaran dengan menambah jangka waktu pembayaran hingga selesai jumlah angsuran pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber bahwa upaya yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo pada penanganan permasalahan pinjaman dana bergulir yaitu:

- a. Melakukan pendekatan kepada anggota KSM, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anggota KSM. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara kita mendatangi rumah masing-masing anggota KSM kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh kelompok dan kita pihak UPK memberikan masukan atau alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya.
- b. Penagihan secara rutin intensif yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo, anggota KSM yang mengalami penunggakan atau macet dalam pembayaran pihak UPK akan datang secara langsung ke tempat usaha atau kediamannya untuk mengontrol kondisi usaha sejauh mana proses pengembalian usaha yang dimilikinya dan penagihan rutin atas peminjaman yang terjadi kemacetan tanpa adanya pemaksaan.

- c. *Reconditioning*, usaha yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam memberikan kebijakan pembebasan bunga atau jasa yang terjadi masalah kredit macet atau penunggakan.
- d. *Reschedulling*, UPK BKM Ngudi Mulyo memberikan keringanan kepada anggota KSM yang melakukan peminjaman dana bergulir memberikan jangka waktu termasuk masa tegang dalam pembayaran sampai tanggungan pembayaran terselesaikan.

C. Analisis Data

1. Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank atau lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁴⁸ Risiko kredit dapat diminimalisir tingkat risiko dalam usaha proses manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran. UPK BKM Ngudi Mulyo dalam proses pelaksanaan program pemberian dana bergulir telah terangkum dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam peraturan operasionalnya.

Dalam proses penggalan data dengan beberapa narasumber dan observasi peneliti bahwa UPK BKM Ngudi Mulyo telah menerapkan standarisasi dalam pengelolaan manajemen risiko. Terdapat misi dengan mengembangkan akses ekonomi kelompok usaha mikro atau kecil dalam

⁴⁸ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia*, 55.

pemberdayaan masyarakat miskin pada wilayah Kelurahan Keniten. Maka ini juga selaras dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Ponorogo bahwa dengan sasaran utama untuk mensejahterakan para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) dalam berbagai sektor.⁴⁹

Terdapat beberapa prosedur yang diharuskan untuk dapat pinjaman dana bergulir tentu dengan menyerahkan persyaratan untuk dijadikan informasi secara garis besar seluruh anggota dalam kelompok tentang hal yang diajukan oleh seluruh anggota kelompok. Proses pengajuan dilakukan analisa oleh UPK untuk menilai apakah usaha pada kelompok tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir tersebut. Hal ini dilakukan oleh UPK BKM dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan dalam risiko kredit. Dalam proses manajemen risiko yang dilaksanakan oleh unit sudah sejalan dengan ketentuan meminimalisir risiko harus dapat mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko dan mengendalikan risiko yang kemungkinan terjadi.⁵⁰ Dengan demikian maka pelaksanaan manajemen program ini akan sangat membantu masyarakat dan pengurangan risiko yang terjadi.

Dari data tersebut setelah dianalisis melalui teori manajemen risiko yang dipakai dalam penelitian ini, UPK BKM Ngudi Mulyo dapat menggambarkan pengelola risiko kredit untuk mencapai sasaran dan tujuan sudah bisa dikatakan baik. Pada program pemberian pinjaman dana bergulir dilakukan dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang

⁴⁹ Kholifah Nadifah, Wawancara, 15 Juni 2021

⁵⁰ Ibid.,

telah diterapkan dalam SOP. Dalam program ini diadakan untuk mensejahterakan masyarakat dalam pengembangan usaha dan mengangkat UKM di Kabupaten Ponorogo, dengan melalui proses pengajuan persyaratan dan analisa dokumen maupun fisik. Proses manajemen risiko dalam pemberian pinjaman dana bergulir dilaksanakan dengan proses mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko dan mengendalikan risiko. UPK BKM Ngudi Mulyo berusaha memberikan kesesuaian program yang dibutuhkan masyarakat pengembangan usahanya.

Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Bambang Riyanto Rustam, yang menjelaskan bahwa setiap lembaga keuangan wajib melakukan proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factor*) yang bersifat material.⁵¹ Akan tetapi proses tersebut masih belum maksimal dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo terkhusus dalam segi proses pemantauan sehingga jarang diketahui perkembangan usaha dan kemampuan dalam mengelola dana pendapatan usaha oleh pihak UPK .

Dalam proses manajemen risiko kredit program pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo dengan teori Bambang, maka :

1. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk manajemen risiko yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam

⁵¹ Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan di Indonesia*, 43.

identifikasi risiko dengan memperoleh informasi karakter secara garis besar seperti latar belakang dan kondisi ekonomi apakah hal-hal tersebut diperlukan untuk dapat dikatakan layak dalam pinjaman ini.⁵² Selain itu juga pandangan karakter dari lingkungan RT sekaligus dengan keterangan legalitas ketua RT. Sedangkan analisis keuangan atau modal yang dimiliki oleh calon anggota KSM juga dalam identifikasi omset yang dimiliki sehingga kemungkinan besar bisa melakukan angsuran.⁵³

Berdasarkan analisis manajemen risiko identifikasi pelaksanaan pinjaman dana bergulir ini di UPK BKM Ngudi Mulyo sudah baik. Dalam identifikasi melalui informasi karakter calon anggota KSM dari latar belakang dan kondisi ekonomi. UPK BKM Ngudi Mulyo juga bekerja sama dengan lingkungan sekitar seperti perangkat desa atau ketua RT untuk informasi secara mendalam. Analisa keuangan calon anggota KSM pun diperlukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam mengetahui kemampuan angsuran.

2. Pengukuran Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk manajemen risiko yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam pengukuran risiko tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Mulai dari muncul permasalahan dalam penunggakan pembayaran sehingga dapat mengakibatkan permasalahan yang

⁵² Observasi, Selasa 25 Juni 2021

⁵³ Siti Nurjanah , Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

terjadi. Pola pengukuran ini seluruh anggota dengan porsi yang sama tidak ada perbedaan kelas, akan tetapi pengukuran risiko kredit yang diterapkan pada permasalahan penunggakan yang mengalami masalah internal maupun eksternal diberikan penanganan khusus. Bentuk reward khusus kepada anggota KSM lancar pembayaran.⁵⁴

Berdasarkan analisis manajemen risiko pengukuran risiko dalam pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo dilakukan dengan baik namun masih perlu perbaikan. Dalam pengukuran risiko masih terjadi beberapa masalah seperti penunggakan pembayaran dan realisasi pinjaman. Untuk mengelola dana pinjaman tetap likuiditas dengan pola aktivitas risiko yang terjadi pada anggota KSM yang mengalami masalah penunggakan sehingga diberikan pengukuran pembayaran secara khusus dengan membayar tanggungan kewajiban pinjaman terlebih dahulu. Realisasi pinjaman yang tidak sesuai kemampuan dalam pembayaran kembali.

3. Pemantauan Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk manajemen risiko yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam pemantauan risiko belum sesuai dengan harapan. Munculnya beberapa permasalahan mulai dari komunikasi antara anggota KSM yang belum optimal sehingga perlu adanya keterbukaan permasalahan yang terjadi

⁵⁴ Ibid.

pada anggota KSM.⁵⁵ Kebutuhan SDM yang terbatas jumlahnya sehingga belum optimal dalam pemantauan, sehingga melibatkan bagian yang lain dalam pemantauan perkembangan usaha. Proses komunikasi dilaksanakan setiap 1x dalam sebulan dengan mendatangi secara langsung lokasi pengembangan usaha.⁵⁶ Dalam pelaksanaan pemantauan UPK BKM Ngudi Mulyo telah melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan standarisasi yang disusun pola pemantauan.

Berdasarkan analisis manajemen risiko pemantauan risiko dalam pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo masih kurang baik perlu penataan kembali dalam melaksanakan pemantauan risiko. Terdapat beberapa permasalahan keberadaan jumlah SDM yang sangat minim sehingga bisa dilakukan perekrutan kembali. Pemantauan yang lambat dan minim juga menjadi permasalahan yang kompleks mengingat UPK BKM merupakan lembaga resmi yang sangat penting keberadaannya sehingga perlu jumlah SDM yang cukup dan mumpuni. Sarana komunikasi yang harus dioptimalkan dalam arah gerak tanggap dalam permasalahan yang dihadapi oleh anggota KSM dan akan menghasilkan output yang cemerlang.

4. Pengendalian Risiko

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk manajemen risiko yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam

⁵⁵ Observasi, Selasa 25 Juni 2021

⁵⁶ Sudarminto, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

pengendalian risiko dilaksanakan sebelum terjadinya penunggakan dalam pembayaran, sehingga kita dapat melakukan mitigasi dalam pencegahan kredit macet. Langkah pengendalian risiko pihak UPK BKM Ngudi Mulyo melakukan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana, memastikan bahwa pengelolaan risiko cukup efektif dalam perkembangan dengan pencegahan melalui metode mitigasi risiko.⁵⁷ Dengan penagihan secara intensif dan program tabungan untuk seluruh anggota KSM dengan tujuan para anggota dapat melakukan pengelola dana tabungan tersebut dijadikan sebagai antisipasi apabila anggota terjadi masalah dalam pemenuhan pembayaran pinjaman.⁵⁸ Meskipun jaminan pinjaman di UPK berbeda dengan lembaga lain, jaminan tersebut bukan barang yang dapat dilelang melainkan jaminan tanggung renteng yang ditanggung oleh keseluruhan dalam kelompok

Berdasarkan analisis manajemen risiko pengendalian risiko dalam pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo, sudah baik dalam pengendalian pembayaran sebelum terjadi masalah kredit macet dengan mitigasi risiko penagihan secara intensif. Dalam pengendalian terdapat program penghimpun dana atau tabungan anggota KSM untuk strategi antisipasi terjadinya penunggakan pembayaran yang nantinya bisa digunakan dalam pembayaran pinjaman tersebut. Selain

⁵⁷ Observasi, Selasa 25 Juni 2021

⁵⁸ Yuni Rahayu, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

tabungan yang menjadi tanggung jawab dalam kelompok dengan metode tanggung renteng yang dikelola dalam kelompok.

5. Analisis Dampak Manajemen Risiko Kredit Dalam Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada UPK BKM Ngudi Mulyo Kabupaten Ponorogo

Dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo berjalan sesuai dengan rencana yang diterapkan, maka output yang dihasilkan bahwa kehadiran adanya program pinjaman dana bergulir di Kelurahan Keniten telah memberikan dampak yang sangat baik, dengan hal ini dilihat dari berbagai aspek yang berpengaruh, salah satu adalah keadaan perekonomian masyarakat dari usaha yang mereka miliki yang tidak mengalami kesulitan permodalan dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat.

Dapat dilihat dari wawancara salah satu ketua KSM Ibu Suprapti bahwasanya beliau mengatakan dalam perekonomian masyarakat di Kelurahan Keniten sudah mengalami cukup baik, terlihat perubahan perkembangan semenjak adanya program pinjaman dana bergulir tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kelancaran usaha Ibu Suprapti dan masing-masing anggota usaha yang dikembangkan selalu mengalami peningkatan pendapatan, sehingga kelancaran dalam usaha tersebut membuat para anggota KSM mampu memenuhi kebutuhan

perekonomian keluarga serta dapat melakukan pembayaran angsuran yang sesuai dengan batas jatuh tempo yang telah ditetapkan.⁵⁹

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dampak manajemen risiko kredit yang ditemukan dalam pinjaman dana bergulir selain dapat membantu dalam mengembangkan perekonomian usaha keluarga, muncul beberapa permasalahan kredit macet yang terjadi pada anggota KSM diantaranya permasalahan kredit macet penunggakan dalam faktor internal maupun faktor eksternal dan permasalahan kredit macet karena terjadi bencana yang dialami oleh anggota KSM maka dengan ini muncul tingkat kredit macet sebesar 12 % dari jumlah anggota sehingga perlu dilakukan penanganan dalam mengatasi risiko kredit.

Penanganan dampak manajemen risiko kredit pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo jika dianalisis dengan menggunakan teori Kasmir maka:

1. *Rescheduling* dalam memberikan perpanjangan jangka waktu kredit pembayaran hingga selesai seluruh kewajiban tanggungan pokok dalam pinjaman bergulir.⁶⁰ Berdasarkan hasil data wawancara dan observasi dengan narasumber yaitu tindakan *Rescheduling* yang dilakukan dengan menambah jangka waktu pembayaran angsuran pokok, tanpa mengurangi jumlah pinjaman. Untuk kategori anggota KSM yang menunggak pembayaran karena mengalami musibah

⁵⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 124.

⁶⁰ Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021

yang dapat memengaruhi usahanya seperti gagal panen perkebunan dan gagal ternak karena mati.⁶¹

2. *Reconditioning* yang dilakukan dalam tindakan masalah kredit bermasalah dengan pembebasan bunga (jasa) kepada anggota KSM yang mengalami tingkat masalah kredit yang berat, sehingga diberikan toleransi dan kelonggaran untuk tetap menyelesaikan kewajiban tanggungan pokok hingga selesai.⁶² Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan narasumber yaitu tindakan dalam *reconditioning* yang diterapkan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dengan pembebasan bunga (jasa) sehingga para anggota KSM yang mengalami penunggakan diberikan batas waktu pembayaran dengan melakukan pembayaran kewajibannya saja, karena dana pinjaman bergulir ini sifatnya harus terus bergulir dimasyarakat bukan termasuk dana hibah.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara observasi, dokumentasi dalam dampak pinjaman dana bergulir terhadap risiko kredit, peneliti menyimpulkan bahwa dari kegiatan program pinjaman dana bergulir yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo sudah berdampak pada peningkatan pendapatan dan terciptanya lapangan pekerjaan sendiri. Bisa diketahui dari kesuksesan salah satu kelompok Wijaya Kusuma keterampilan dan hasil keuntungan yang bisa dimanfaatkan dalam kebutuhan penjualan dan

⁶¹ Ibid.

⁶² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 124.

⁶³ Suraji, Wawancara

kebutuhan sehari-harinya. Hal ini dipengaruhi dari beberapa kepribadian seseorang yang menjadi masalah kedisiplinan anggota KSM. Beberapa anggota KSM yang mengalami permasalahan dalam pembayaran kembali pinjaman dana bergulir sehingga dapat menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memenuhi harapan yang sesuai keinginan saat awal pinjaman.

Tindakan pelestarian dana bergulir hal yang penting, meskipun dalam prakteknya manajemen risiko kredit bermasalah dalam pemberian pinjaman dana bergulir tanpa adanya jaminan kepada UPK BKM Ngudi Mulyo sudah sesuai dengan SOP manajemen risiko kredit. Terbukti kesuksesan UPK BKM Ngudi Mulyo dalam tahun dari awal berdiri sampai sekarang dapat mensejahterakan masyarakat melalui dana bergulir dan kasus kredit yang bermasalah tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu perputaran dana bergulir tetapi tetap jaga likuiditas .

Berdasarkan teori Kasmir yang menjelaskan tentang upaya penanganan kredit bermasalah yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi dan Eksekusi. Namun langkah penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh UPK BKM Ngudi Mulyo hanya *Rescheduling* dan *Reconditioning* berjalan dengan baik sehingga tindakan tersebut bisa dilaksanakan oleh pihak UPK, KSM dari hasil musyawarah evaluasi internal BKM.

BAB V

PENUTUP

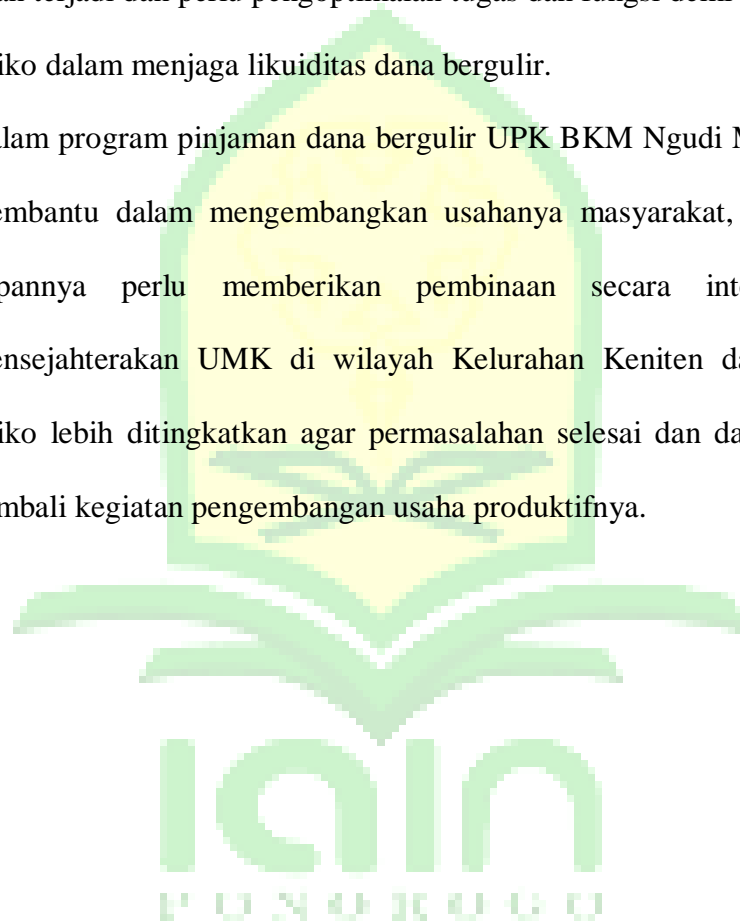
A. Kesimpulan

1. Manajemen risiko pada pinjaman dana bergulir di UPK BKM Ngudi Mulyo adalah identifikasi risiko menganalisa karakter, kondisi ekonomi dan keuangan kelayakan calon anggota KSM dari informasi data yang diperoleh dan bentuk tanggung jawab tanggung renteng dalam jaminan pinjaman. Pengukuran risiko pinjaman diukur dengan kelancaran pembayaran kewajiban pokok, kemudian diukur dengan pemberian kebijakan khusus. Pemantauan risiko masih belum berjalan dengan baik sesuai job deksription dan tindakan pengawasan dilakukan 1 kali dalam sebulan dengan melihat perkembangan kondisi usaha. Pengendalian risiko yang dilakukan berjalan cukup efektif dengan mitigasi risiko sebelum terjadinya penunggakan dan program tabungan anggota untuk antisipasi dalam permasalahan penunggakan pembayaran pinjaman.
2. Dampak manajemen risiko kredit pinjaman dana bergulir muncul permasalahan kredit macet yang terjadi dalam masalah penunggakan dan terjadi bencana selain itu juga masyarakat sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha, pemerataan pendapatan terciptanya lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan pengangguran. Penanganan risiko dengan pendekatan secara langsung dan penagihan secara intensif dengan metode penanganan kredit macet yang dilakukan

oleh UPK BKM Ngudi Mulyo dalam penanganan pinjaman bermasalah menggunakan *rescheduling* dan *reconditioning*.

B. Saran

1. Untuk UPK BKM Ngudi Mulyo harus lebih meningkatkan proses penerapan manajemen risiko dalam mendeteksi risiko-risiko dini yang akan terjadi dan perlu pengoptimalan tugas dan fungsi demi memperkecil risiko dalam menjaga likuiditas dana bergulir.
2. Dalam program pinjaman dana bergulir UPK BKM Ngudi Mulyo sangat membantu dalam mengembangkan usahanya masyarakat, sehingga ke depannya perlu memberikan pembinaan secara intensif untuk mensejahterakan UMK di wilayah Kelurahan Keniten dan penanganan risiko lebih ditingkatkan agar permasalahan selesai dan dapat memulai kembali kegiatan pengembangan usaha produktifnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Andrianto. *Manajemen Kredit:Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan:Qiara Media, 2020.
- Buku Panduan Operasional BKM Ngudi Mulyo Keniten
- Buku Pedoman AD/ART BKM
- Buku Pinjaman KSM tahun 2020 – 2021
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: teori, masalah, kebijakan dan aplikasi lengkap dengan analisis kredit*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Firdaus, Rachmat. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta, BPFE, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko: Mengendalikan Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2014.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo, 2012.
- Khan Ahmad Habib, Tariqullah. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pedoman Proposal Penambahan Modal KSM
- Rustam, Bambang Riyanto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung : Refika Aditama, 2014.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019

Takdir Syaifuddin, Dedy. *Manajemen Perbankan: Pendekatan Praktis*. Kendari: Unhalu Press, 2007.

Skripsi

Nadia, Sarah. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Niswati, Khoirun. Aplikasi Manajemen Risiko Kredit Pada BPR Nusumma Gondanglegi Malang. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.

Sopingi. Analisis Pemberian Pinjaman Ekonomi Bergulir Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Ditinjau dari segi Ekonomi Islam. Skripsi. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Sulistiyoningrum, Stefi. Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.

Yanty, Irma. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Jurnal

Indah Fitriana, Amalia dan Hendra Galuh Febrianto. Manajemen Risiko Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (studi empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Tangerang). Tangerang: Profita, 2018.

Lesmana, Iwan. Risiko Operasional Bank dan Permodelannya. *Indonesia Journal of Accounting and Governance*, 2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Wineta Pratiwi dkk, Yaniar Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Ponorogo). Malang: Jurnal Administrasi Bisnis, 2016.

Sumber Lain

Observasi, 05 Nopember 2020

Observasi, Selasa 25 Juni 2021

Suraji, Wawancara, 05 Nopember 2020.
Saifuddin, Wawancara, 05 Nopember 2020.
Ahmad Senen, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021.
Bijanto, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021.
Siti Lutfiyah Isnaini, Wawancara, 15 Juni 2021
Suprapti, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021.
Suryani, Wawancara, Selasa 15 Juni 2021
Eko Hartanto, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021
Ema Puspitasari, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021
Saifuddin, Wawancara, Selasa 25 Mei 2021
Siti Nurjanah, Wawancara Selasa 25 Juni 2021
Sudarminto, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021
Suraji, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021
Yuni Rahayu, Wawancara, Selasa 25 Juni 2021
Suraji, Wawancara, 26 Mei 2021.
Kholifah Nadifah, Wawancara, 27 Mei 2021



